



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

KEGIATAN

MS I Tahun Sidang 2021-2022

(10 Agustus – 21 September 2021)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

DAFTAR ISI

WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORKESRA	1
KOMISI I	25
A. FUNGSI LEGISLASI	25
B. FUNGSI ANGGARAN	25
C. FUNGSI PENGAWASAN	25
KOMISI II	29
A. FUNGSI LEGISLASI	29
B. FUNGSI ANGGARAN	29
C. FUNGSI PENGAWASAN	29
KOMISI III	30
A. FUNGSI LEGISLASI	30
B. FUNGSI ANGGARAN	34
C. FUNGSI PENGAWASAN	35
D. TUGAS KHUSUS	44
KOMISI IV	46
A. FUNGSI LEGISLASI	46

B. FUNGSI ANGGARAN	46
C. FUNGSI PENGAWASAN	46
KOMISI V	47
A. FUNGSI LEGISLASI	47
B. FUNGSI ANGGARAN	47
C. FUNGSI PENGAWASAN	47
KOMISI VI	48
A. FUNGSI LEGISLASI	48
B. FUNGSI ANGGARAN	48
C. FUNGSI PENGAWASAN	48
KOMISI VII	49
A. FUNGSI LEGISLASI	49
B. FUNGSI ANGGARAN	49
C. FUNGSI PENGAWASAN	52
KOMISI VIII	55
A. FUNGSI LEGISLASI	55
B. FUNGSI ANGGARAN	55
C. FUNGSI PENGAWASAN	55

KOMISI IX	56
A. FUNGSI LEGISLASI	56
B. FUNGSI ANGGARAN	56
C. FUNGSI PENGAWASAN	56
KOMISI X	57
A. FUNGSI LEGISLASI	57
B. FUNGSI ANGGARAN	58
C. FUNGSI PENGAWASAN	59
KOMISI XI	63
A. FUNGSI LEGISLASI	63
B. FUNGSI ANGGARAN	66
C. FUNGSI PENGAWASAN	82
BADAN LEGISLASI	87
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN	90
BADAN ANGGARAN	103
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	109
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	111

LAPORAN DWI MINGGUAN WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORRES

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
1.	Roadshow Politik Kesejahteraan Wakil Ketua DPR RI/Korres dengan Masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan Tema : “Gus Muhaimin Mendengar” tanggal 10 Agustus 2021	Pertemuan Virtual	Wakil Ketua DPR RI/Korres dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut: 1) Perlu perubahan cara kerja pertanian di Indonesia. Masalah kelangkaan pupuk juga menunjukkan fakta bahwa subsidi, distribusi dan pelaku hilir dan hulu pertanian harus dievaluasi, termasuk juga pengawasan. Kami sudah beberapa kali meminta Kementerian Pertanian dan pihak terkait membahas persoalan kelangkaan pupuk. Kadang-kadang pupuk banyak tapi distribusinya tidak tepat. Ini agenda serius kami, dan akan kami sampaikan melalui Presiden untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini. 2) Soal pariwisata, menyatakan sudah memanggil Menteri Pariwisata dan meminta cara kerja baru menangani pariwisata. Menurut dia dibanding pariwisata ditutup, lebih baik prokes saja diperketat. Jadi kami sampaikan dibanding pariwisata ditutup, lebih baik tetap dibuka tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu jaga mobilitas orang, dan vaksinasi dipercepat. Dan tak kalah penting utamakan wisatawan lokal.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
2.	Roadshow Politik Kesejahteraan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Masyarakat Kalimantan Barat dengan Tema : “Gus Muhaimin Mendengar” tanggal 12 Agustus 2021	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terkait bansos, sudah berbicara dan menyampaikan kepada pemerintah, melalui Komisi VIII DPR RI, agar bantuan sosial diberikan secara tunai. Selain masyarakat bisa menggunakan sesuai kebutuhan, bantuan tunai juga mencegah kerawanan korupsi. 2) Terkait pelibatan tokoh agama dalam mencegah penyebaran pandemi, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra berkali-kali mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menanggulangi covid ini sendirian. Pemerintah harus melibatkan seluruh komponen masyarakat agar tidak kedodoran. Sebagai ketua pengawas Covid DPR RI, beberapa waktu lalu mengunjungi Biofarma untuk melihat dan memastikan ketersediaan vaksin, sekaligus memberi himbauan kepada pemerintah bahwa agar program vaksinasi berjalan optimal, perlu melibatkan ormas dan lembaga-lembaga masyarakat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. 3) Untuk dana desa, akan segera berkomunikasi dengan Menteri Desa untuk menanyakan sejauh mana penyaluran dana desa ini sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi warga desa di tengah himpitan ekonomi akibat pandemik.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
3.	Roadshow Politik Kesejahteraan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Masyarakat Kalimantan Selatan dengan Tema : “Gus Muhaimin Mendengar” tanggal 12 Agustus 2021	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wakil Ketua DPR RI/Korkesra akan meneruskan persoalan vaksin di Kalimantan Selatan ini kepada pemerintah pusat. Wakil Ketua DPR RI/Korkesra ini juga akan segera memerintahkan Komisi IX DPR RI, untuk mengecek ketersediaan vaksin ini pada Kementerian Kesehatan sehingga bisa segera didistribusikan ke masyarakat. 2) Terkait pendidikan, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra juga telah meminta Komisi X DPR RI, yang membidangi Pendidikan, untuk secepatnya berkoordinasi dengan Nadim Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), untuk terus memantau persoalan Pendidikan jarak jauh yang terbukti sudah tidak efektif ini. Penting untuk dicari terobosan alternatif agar bangsa ini tidak mengalami <i>lost generation</i>.
4.	Roadshow Politik Kesejahteraan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan Tema : “Gus Muhaimin Mendengar” tanggal 13 Agustus 2021	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terkait dengan Vaksin dengan tegas siap memperjuangkannya di DPR. Menurutnya vaksin adalah satu-satunya cara cepat mengurangi penularan Covid-19 sehingga aksesnya pun seharusnya diperbanyak. Tidak ada jalan lain kecuali melakukan vaksinasi dengan cepat. Yang bisa kita lakukan di DPR

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>pertama mengawasi, dan saya minta kepada Pemerintah Daerah juga untuk berkoordinasi dengan Komisi IX ataupun langsung kepada Menteri Kesehatan, Kepolisian dan TNI.</p> <p>2) Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mengakui salah satu titik lemah vaksinasi di Indonesia adalah lemahnya keterlibatan masyarakat. Selama ini vaksinasi sepenuhnya dihandle langsung oleh pemerintah dan memunculkan ketidakmaksimalan di daerah-daerah tertentu. Pemerintah memang sangat ideal, dalam artian ingin bekerja cepat sendiri, penanganan yang efektif (dan) ingin menjadi solusi yang efektif. Tapi ternyata tidak terjadi efektifitas karena tidak melibatkan secara massif partisipasi masyarakat.</p> <p>3) Mendengar seluruh aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti. Di sisi lain Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menyebut masalah-masalah itu memang menjadi perhatiannya di DPR, baik persoalan yang terkait dengan PMI, pertanian dan perikanan, serta vaksinasi.</p>
5.	Audiensi Wakil Ketua DPR RI dengan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat (PB AMAN) dengan Tema :	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <p>1) Keberadaan masyarakat adat masih sering diabaikan dalam proses pembangunan bangsa. Wakil Ketua DPR</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
	<p>Pembahasan RUU Tentang Masyarakat Adat dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 tanggal 17 Agustus 2021</p>		<p>RI Bidang Korkesra mengatakan, peran masyarakat adat selama ini belum sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan selama ini untuk kemajuan bangsa. Proses pembangunan selama ini sangat sedikit melibatkan masyarakat adat kita, bahkan mungkin saja pembangunan mengabaikan eksistensi masyarakat adat, terutama pembangunan sumber daya manusianya.</p> <p>2) Sejarah masyarakat adat dan sejarah perkembangan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat adat, eksistensi Indonesia sebagai bangsa tidak bisa kokoh dan bangsa ini bisa terpecah belah dari gempuran masyarakat global yang dahsyat. Sayangnya peran penting masyarakat adat ini belum sebanding dengan kontribusinya yang selama ini memelihara dan menjaga kebangsaan kita, menjaga alam kita dan kultur kita.</p> <p>3) Bangsa ini masih sering mengalami dilema berupa eksploitasi sumber daya alam yang merata di seluruh Tanah Air, dan dalam prosesnya kerap berhadapan dengan hukum dan masyarakat adat.</p> <p>4) Menyambut baik inisiatif PB AMAN yang terus mengupayakan pengajuan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA). Selama ini, RUU MA sudah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>(Prolegnas), namun selalu kandas di tengah jalan. Kita akan berusaha keras lagi. Kita bagi tugas mengkonsolidir dan mengetahui secara persis permasalahan yang menyebabkan RUU MA mendapatkan penolakan (di DPR). Selama ini DPR dan sejumlah fraksi lain di DPR memiliki concern dalam menata masa depan dan keberadaan masyarakat adat. Mereka harus terlibat dan menjadi bagian utuh dari pembangunan, dan keterlibatan secara aktif yang secara langsung dilindungi dan didorong serta difasilitasi oleh regulasi nasional kita, terutama undang-undang.</p> <p>5) Setelah mendapatkan masukan dari AMAN, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra akan menyampaikan secara langsung kepada Presiden dan menteri terkait serta pihak-pihak berwenang lainnya agar RUU MA bisa gol menjadi sebuah UU sebagai landasan hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat.</p>
6.	<p>Roadshow Politik Kesejahteraan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Masyarakat Sulawesi Selatan dengan Tema : “Gus Muhaimin Mendengar” tanggal 19 Agustus 2021</p>	<p>Pertemuan Virtual</p>	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <p>1) Dalam kesempatan ini Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra itu menyampaikan tiga target dalam Roadshow Politik Kesejahteraan ini. <i>Pertama</i> soal politik kesejahteraan politik yang inklusif, Kita perlu menjelaskan apa sih politik kesejahteraan itu. Beberapa</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>hal menyangkut politik kesejahteraan adalah strategi pembangunan yang inklusif yang bertujuan menyampaikan seluruh target dan pembangunan dengan fokus utamanya adalah kesejahteraan. Setiap kebijakan di dalam politik kesejahteraan inklusif adalah proses yang melibatkan semua pihak dengan terbuka dan demokrasi. Keterlibatan semua elemen bangsa sangat dibutuhkan, Keterlibatan para tokoh, masyarakat dan pemerintah serta subjek pembangunan menjadi satu kesatuan. Ini menjadi bagian satu kesatuan pemerintah dan masyarakat itulah politik kesejahteraan yang inklusif.</p> <p>2) Target <i>kedua</i> dari Roadshow Politik Kesejahteraan adalah ia ingin mendengar fakta-fakta lapangan terkait keadaan masyarakat Sulsel, Saya ingin mendengar fakta di lapangan seperti apa sehingga saya bisa memperjuangkan bersama pemerintah, bersama Presiden, maupun bersama DPR. K</p> <p>3) Target <i>Ketiga</i>, kita saling berbagi informasi apa yang bisa kita lakukan mengatasi pandemi ini.</p> <p>4) Mendengar masukan dari masyarakat Sulsel, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra siap memperjuangkannya, “Terima kasih segala masukannya, saya akan berusaha untuk terus</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			memperjuangkan semua aspirasi masyarakat Sulsel ini.
7.	Roadshow Politik Kesejahteraan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Masyarakat Sulawesi Tenggara dengan Tema : “Gus Muhaimin Mendengar” tanggal 19 Agustus 2021	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra lebih banyak mendengar aspirasi dari masyarakat Sultra mulai dari praktisi kesehatan, Pendidikan, pelaku UMKM, pegiat literasi desa, kepala desa serta tokoh masyarakat lainnya. 2) Mendengar aspirasi dari perwakilan masyarakat Sultra tersebut, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra mengaku siap memperjuangkan ke pihak terkait baik eksekutif maupun legislatif. Kami siap mempejuangkan dan memberikan solusi terkait problem Kesehatan, Pendidikan, UMKM hingga persoalan di desa-desa. Terima kasih, atas aspirasi yang telah disampaikan. 3) Terakhir, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra itu mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol Kesehatan (Prokes) dan mengikuti vaksinasi Covid-19.
8.	Pengurus DPP Perempuan Bangsa, Tanggal 20 Agustus 2021	“Refleksi Muharram 1443 H” Perempuan Bangsa dengan Anak Yatim	Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Menghadiri acara “Refleksi Muharram 1443 H” Perempuan Bangsa dengan Anak Yatim

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
9.	Roadshow Politik Kesejahteraan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Masyarakat Maluku Utara dengan Tema : “Gus Muhaimin Mendengar” tanggal 23 Agustus 2021	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menanggapi berbagai keluhan masyarakat Maluku Utara, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra menyatakan siap memperjuangkan hak-hak masyarakat disabilitas. Selama ini sudah ada UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bila selama ini realisasi di lapangan belum berjalan dengan baik maka pihaknya akan mendorong dan mengingatkan para pemegang kebijakan untuk bisa menjalankan UU dengan baik. Kita dorong mulai Presiden hingga kepala daerah, undang-undang ini banyak dilupakan oleh semua orang. Saatnya kita angkat lagi supaya bisa dilaksanakan dengan baik. 2) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra ini juga siap untuk mengupayakan kesejahteraan bagi para imam masjid, termasuk persoalan pendidikan yang selama masa pandemi ini belum berjalan baik. Soal pendidikan memang sejak pandemi ini kacau balau. Saya beberapa kali memanggil Mendikbud untuk memberikan perhatian khusus karena tidak efektifnya pendidikan daring. Sampai detik ini ada dua keputusan, Pemda dipersilakan mengambil pilihan daring atau tatap muka dengan prokes ketat. Kedua APBN didorong untuk

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			memfasilitasi carut marut atau kekurangan fasilitas atau sarpras bagi pendidikan di era pandemi ini. 3) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra juga setuju bahwa kekuatan adat masyarakat dengan kultur khasnya harus diberikan ruang. APBN juga harus beri ruang kesempatan tumbuh berkembangnya masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perlu ada sinergi potensi adat dan pemerintahan.
10.	Roadshow Politik Kesejahteraan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Masyarakat Maluku dengan Tema : “Gus Muhaimin Mendengar” tanggal 23 Agustus 2021	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> 1) Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra lebih banyak mendengar aspirasi dari masyarakat Maluku mulai dari praktisi kesehatan, Pendidikan, pelaku UMKM, pegiat literasi desa, Pendeta, Mahasiswa, kepala desa serta tokoh masyarakat lainnya 2) Menanggapi berbagai keluhan masyarakat, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra mengatakan dirinya mengatakan bahwa memang ingin menyerap masukan sebanyak-banyaknya aspirasi dari masyarakat untuk ditindaklanjuti dan disampaikan secara langsung kepada pemerintah. 3) Dari berbagai aspirasi masyarakat Maluku yang disampaikan, tentu akan kami tindaklanjuti. Tadi ada berbagai persoalan, mulai disparitas pembangunan, persoalan kemiskinan di Maluku, termasuk

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>penanganan pandemi. Ini menjadi masukan yang cukup bagus dan akan saya sampaikan ke kementerian terkait, termasuk kepada Bapak Presiden.</p>
11.	<p>Audiensi Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan International NGO Forum On Indonesia Development (INFID) dengan Tema : Pemaparan hasil survey warga “akses dan layanan Kesehatan di 6 Kabupaten/Kota pada era Pandemi COVID-19” tanggal 24 Agustus 2021</p>	<p>Pertemuan Virtual</p>	<p>Tujuan dari pelaksanaan audiensi adalah untuk mendengarkan pemaparan hasil survey warga “akses dan layanan Kesehatan di 6 Kabupaten/Kota pada era Pandemi COVID-19 (Semarang, Surabaya, Padang, Malang, Makassar dan Kab.Tangeranng). Survey ini dilatarbelakangi pentingnya menggali persepsi warga khususnya kelompok rentan tentang kualitas pelayanan Kesehatan warga dan Covid-19 di Indonesia.</p> <p>Selanjutnya Direktur INFID mengawali proses pemaparan dengan menjelaskan tujuan dari survey ini adalah untuk menggali pandangan dari warga, khususnya kelompok rentan tentang kualitas pelayanan Kesehatan warga dan covid. INFID juga menjelaskan bahwa maksud audiensi ini agar menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR dalam memperbaiki kualitas pelayanan kualitas Kesehatan warga berdasarkan temuan-temuan di lapangan (6 Kabupaten/Kota).</p> <p>Hasil survey warga dipaparkan menghasilkan Beberapa rekomendasi dari hasil survey, diantaranya adalah:</p> <p>a. Perbaiki Pelayanan sistem Kesehatan publik di 6 kabupaten/kota;</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>b. Peningkatan informasi layanan Kesehatan perempuan di 6 kabupaen/kota;</p> <p>c. Kemudahan mekanisme pengaduan layanan Kesehatan;</p> <p>d. Penguatan sistem Kesehatan publik nasional melalui penambahan nakes 100-200 selama tiga tahun, alokasi dana tambahan 1-1.5% PDB sektor Kesehatan;</p> <p>e. Penguatan kapasitas Kemenkes: Transparansi dan akuntabilitas, percepatan pencairan tunjangan nakes, percepatan distribusi obat dan vaksin ke daerah;</p> <p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <p>1) Survey ini dalam pandangan Wakil Ketua DPR RI sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayanan warga dan juga sangat penting dalam kerangka perumusan kebijakan sistem Kesehatan yang lebih baik dan berkeadilan.</p> <p>2) Setelah mendengarkan hasil pemaparan survey warga, Wakil Ketua DPR/Korkesra menerima dengan baik rekomendasi-rekomendasi dari hasil survey warga ini dan akan menindaklanjuti yang menjadi wewenang dari Wakil Ketua DPR RI/Korkesra.</p>
12.	Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning di	Istighotsah bersama para kyai dan ulama	Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menghadiri Istighotsah bersama para kyai dan ulama di Pondok Pesantren Baitul

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
	dusun Haurkuning, Desa Mandalaguna, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya		Hikmah Haur Kuning di dusun Haurkuning, Desa Mandalaguna, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya melalui Virtual.
13.	Roadshow Politik Kesejahteraan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Masyarakat Sumatera Barat dengan Tema : “Gus Muhaimin Mendengar” tanggal 26 Agustus 2021	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <p>1) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra memberikan perhatian serius soal pengembangan Kampus Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumbar. Menurutnya, UNU Sumbar harus diberikan perhatian khusus karena merupakan kampus embrio di Sumbar. UNU Sumbar ini harus menjadi perhatian kita. Untuk UNU ini, saya menyarankan untuk belajar ke UNU Jogja. Kampus ini yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Nanti saya dorong untuk bisa belajar kesana. UNU ini mempunyai kemampuan rencana sekaligus perhatian pemerintah untuk tidak salah dalam mengambil program-programnya.</p> <p>2) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra berjanji akan menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung terkait Kelanjutan Pembangunan Jalan tol Sumbar-Pekanbaru Riau. Karena Presiden sangat memberikan perhatian khusus kepada pembangunan infrastruktur.</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
14.	Roadshow Politik Kesejahteraan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Masyarakat Sumatera Selatan dengan Tema : “Gus Muhaimin Mendengar” tanggal 26 Agustus 2021	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mengapresiasi masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) yang telah menjaga persatuan dan kesatuan. Menurutnya, Sumsel dibangun dengan budaya kebhinekaan yang sangat kokoh. Provinsi Sumatera Selatan memang dahsyat dalam menjaga persatuan dan kesatuan, dimana kebhinekaan sangat nyata, dari berbagai suku, agama dan golongan yang bermacam-macam tapi memang sangat kokoh. 2) Wakil Ketua DPR RI/Korkesra setuju dengan gagasan yang menyatakan budaya sebagai lokomotif yang tidak terpisahkan dengan pembangunan ekonomi, sosial dan pembangunan lainnya. 3) Menanggapi soal pesantren, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menyampaikan, Pemerintah Pusat atau Presiden Jokowi telah memberikan perhatian kepada Pondok Pesantren. Ia telah menandatangani UU Pesantren tersebut. Tinggal daerah untuk menindaklanjutinya. Pak Jokowi sudah memulai soal pesantren, yang lain tinggal menindaklanjuti. Kita apresiasi Presiden Jokowi yang telah berkomitmen dalam mendukung pesantren. Kita akan dorong terus. Saat pandemi ini, pesantren masih konsisten dan

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			bertahan. Pesantren tetap melakukan tatap muka dan berlangsung normal.
15.	Halaqah Majelis Taklim (HMT) tanggal 29 Agustus 2021	Gebyar Muharram 1443 H Halaqah Majelis Taklim (HMT) dengan Anak Anak Yatim	Wakil Ketua DPR RI menghadiri Kegiatan “Gebyar Muharram 1443 H” Halaqah Majelis Taklim (HMT) dengan Anak Anak Yatim
16.	Roadshow Politik Kesejahteraan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Masyarakat Papua Barat dengan Tema : “Gus Muhaimin Mendengar” tanggal 30 Agustus 2021	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendengar berbagai aspirasi yang disampaikan warga Papua Barat, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra siap memperjuangkannya di DPR bagi kesejahteraan Papua. Secara bersama-sama, seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan di DPR. Saya akan terus berjuang bagi kesejahteraan Papua. Hati saya selalu bersama sama masyarakat Papua. 2) Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mengatakan, harapan baru untuk Papua Barat saat ini lebih baik dan semakin nyata dengan adanya Undang-Undang Otsus Nomor 2 tahun 2021, 3) Terobosan kebijakan ini merupakan solusi terbaik, kebijakan yang kompromistis, dari ditiadakannya partai politik lokal. Dengan kebijakan ini, diharapkan putra-putri terbaik Papua Barat dapat memberikan kontribusi

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>terbaik untuk pembangunan Papua Barat sekaligus untuk Indonesia tercinta.</p> <p>4) UU Otsus dulu hanya melahirkan 1 Peraturan Pemerintah, yakni adanya lembaga kultur orang asli Papua Majelis Rakyat Papua. Kini, akan ada 7 buah produk Peraturan Pemerintah yang saat ini masih dalam bentuk rancangan.</p> <p>5) Disisi lain, Papua Barat dalam 2 tahun terakhir ini selalu dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia. Hal ini sangat membanggakan dan layak kita terus pertahankan. Toleransi antar sesama anak-anak bangsa merupakan modal sosial yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan.</p> <p>6) Meneladani spirit perjuangan Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh yang mampu mendengar rakyat Papua. Keteladanan beliau sudah banyak kita baca, kita dengar, dan akan kita wariskan kepada bangsa Indonesia.</p> <p>7) Ada dua hal mendasar dan fundamental untuk membangun Papua dan Papua barat di masa depan. <i>Pertama</i>, pembangunan harus berpijak dan berlandas pada jalan kebudayaan/pendekatan budaya. Nilai, tradisi, etika, norma, budaya, hukum adat, serta aturan-aturan khusus yang dimiliki masyarakat Papua.</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>Jalan kebudayaan akan mampu membangun kohesivitas dan solidaritas sosial, menjadikan masyarakat asli Papua merasa memiliki, tidak terasing di tanah kelahirannya. <i>Kedua</i>, masa depan Papua Barat hanya bisa diwujudkan dengan melakukan transformasi dari pembangunan yang bersifat eksklusif ke inklusif. Pendekatan eksklusif pada masa lalu di bumi Papua telah menciptakan pertumbuhan yang buruk dan mengarah pada pengucilan atau eksklusi sosial masyarakat Papua sendiri.</p> <p>8) Pembangunan inklusif di Papua adalah sebuah model pembangunan yang dalam pelaksanaannya harus melakukan dua hal sekaligus, yakni pelaksanaan demokrasi langsung dan distribusi infrastruktur sosial.</p>
17.	Roadshow Politik Kesejahteraan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Masyarakat Papua dengan Tema : “Gus Muhaimin Mendengar” tanggal 30 Agustus 2021	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <p>1) Mendengar berbagai aspirasi yang disampaikan warga Papua Barat, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra siap memperjuangkannya di DPR bagi kesejahteraan Papua. Secara bersama-sama, seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan di DPR. Saya akan terus berjuang bagi kesejahteraan Papua. Hati saya selalu bersama sama masyarakat Papua.</p> <p>2) Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mengatakan, harapan baru untuk Papua Barat saat ini lebih baik dan semakin</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>nyata dengan adanya Undang-Undang Otsus Nomor 2 tahun 2021,</p> <p>3) Terobosan kebijakan ini merupakan solusi terbaik, kebijakan yang kompromistis, dari ditiadakannya partai politik lokal. Dengan kebijakan ini, diharapkan putra-putri terbaik Papua Barat dapat memberikan kontribusi terbaik untuk pembangunan Papua Barat sekaligus untuk Indonesia tercinta.</p> <p>4) UU Otsus dulu hanya melahirkan 1 Peraturan Pemerintah, yakni adanya lembaga kultur orang asli Papua Majelis Rakyat Papua. Kini, akan ada 7 buah produk Peraturan Pemerintah yang saat ini masih dalam bentuk rancangan.</p> <p>5) Disisi lain, Papua Barat dalam 2 tahun terakhir ini selalu dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia. Hal ini sangat membanggakan dan layak kita terus pertahankan. Toleransi antar sesama anak-anak bangsa merupakan modal sosial yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan.</p> <p>6) Meneladani spirit perjuangan Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh yang mampu mendengar rakyat Papua. Keteladanan beliau sudah banyak kita baca, kita dengar, dan akan kita wariskan kepada bangsa Indonesia.</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>7) Ada dua hal mendasar dan fundamental untuk membangun Papua dan Papua barat di masa depan. Pertama, pembangunan harus berpijak dan berlandas pada jalan kebudayaan/pendekatan budaya. Nilai, tradisi, etika, norma, budaya, hukum adat, serta aturan-aturan khusus yang dimiliki masyarakat Papua. Jalan kebudayaan akan mampu membangun kohesivitas dan solidaritas sosial, menjadikan masyarakat asli Papua merasa memiliki, tidak terasing di tanah kelahirannya. Kedua, masa depan Papua Barat hanya bisa diwujudkan dengan melakukan transformasi dari pembangunan yang bersifat eksklusif ke inklusif. Pendekatan eksklusif pada masa lalu di bumi Papua telah menciptakan pertumbuhan yang buruk dan mengarah pada pengucilan atau eksklusi sosial masyarakat Papua sendiri.</p> <p>8) Pembangunan inklusif di Papua adalah sebuah model pembangunan yang dalam pelaksanaannya harus melakukan dua hal sekaligus, yakni pelaksanaan demokrasi langsung dan distribusi infrastruktur sosial.</p>
18.	Audiensi Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dengan Tema : Perlindungan	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <p>1) Menanggapi berbagai keluhan yang disampaikan para mantan atlet, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra sangat terpanggil untuk menjadi bagian dari perjuangan para</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
	Kesejahteraan bagi Pelatih, Pemain, dan Pengurus Sepakbola Indonesia, tanggal 1 September 2021		<p>atlet. Menurutnya, ada 3 (tiga) hal yang harus dilakukan. <i>Pertama</i>, dalam jangka pendek, DPR Bersama dengan Pemerintah dan stakeholder terkait, baik kemenpora, Kemenaker, BPJS, dan pihak-pihak terkait lainnya agar setidaknya melakukan langkah-langkah spesifik untuk memberikan perlindungan bagi para mantan atlet. BPJS dan Pemda juga bisa ikut terlibat agar bagaimana segera ada perlindungan yang baik bagi para atlet, khususnya sepak bola. <i>Kedua</i>, Gus Muhaimin siap untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo agar segera ikut campur tangan dalam mengatasi persoalan yang dihadapi para atlet, supaya lebih cepat. Menko PMK sebenarnya bisa, tapi lebih efektif kalau Presiden. Saya bisa bantu sampaikan ke Presiden supaya ada perhatian konkret, tidak retorik. <i>Ketiga</i>, harus ada perangkat untuk melindungi para atlet, baik berupa UU atau aturan-aturan lainnya. Hal ini dikira tidak sulit karena komitmen DPR tinggi terhadap atlet.</p> <p>2) Wakil Ketua DPR RI/Korkesra juga mengaku senang bisa beraudiensi dengan para pengurus Timnas Merah Putih yang di masa jayanya telah banyak mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Senang sekali ketemu para bintang, tentu pemain-pemain kebanggaan nasional yang punya banyak peran.</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>Ketua Komisi X DPR RI juga menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi X DPR RI telah membantu diselenggarakannya Liga 1, setelah kordinasi dengan Kapolri dan pemangku kepentingan lainnya. 2) komisi X berkomitmen menyelesaikan UU sistem keolahragaan pada bulan Desember ini sebagai bukti komitmen dalam memperhatikan kesejahteraan para atlet 3) Kami menunggu masukan langsung dari APPI untuk memberikan pendapat untuk kesejahteraan atlet dalam RUU SKN, termasuk saat ini kami mendorong alokasi 3%, tapi tidak mudah saat ini hanya 0,3 % untuk olah raga.
19.	Audiensi Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), denganTema : Uang Kuliah Tunggal Tak Terjangkau, Mahasiswa Menggugat, tanggal 1 September 2021	Pertemuan Virtual	<p>Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dalam pertemuan dimaksud menyampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa agar semua anggaran pendidikan di masa pandemi Covid-19 difokuskan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan. Konsekuensinya alokasi anggaran untuk pembangunan fisik yang tidak substantif sebaiknya dihentikan sementara. Saat ini yang penting bagaimana penyelenggaraan pendidikan baik di level dasar, menengah, dan tinggi bisa dilanjutkan. Tidak ada anak

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>yang putus kuliah, tidak ada mahasiswa yang harus drop out karena persoalan biaya.</p> <p>2) Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mengatakan situasi pandemi saat ini memberikan dampak luar biasa bagi setiap lini kehidupan bernegara. Pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini juga membuat anggaran negara terkuras untuk membiayai pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, maupun mengurangi dampak sosial. Kami meminta Komisi X DPR RI untuk menyisir anggaran Pendidikan 20% APBN harus difokuskan pada program anggaran yang tepat sasaran. Biaya kuliah harus jadi prioritas, kebutuhan dasar harus diutamakan dibandingkan dengan kegiatan lain yang tidak relevan pada penyelenggaraan Pendidikan di masa pandemi.</p> <p>3) Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menilai saat ini memang banyak dijumpai kasus mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Padahal di satu sisi pemerintah telah mengalokasikan skema bantuan UKT bagi mahasiswa. Kami berharap agar persoalan UKT ini bisa segera diselesaikan. Lakukan terus koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Baik mengkomunikasikan melalui Komisi X DPR RI agar tersampaikan kepada Kemendikbudristek maupun</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>kepada rektorat sehingga kasus-kasus UKT di lapangan bisa terselesaikan dengan baik.</p> <p>4) Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mengaku kaget saat mengetahui ada lima mahasiswa di Madura yang ditahan setelah melakukan unjuk rasa terkait UKT. Dalam waktu dekat dirinya akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan kasus hukum lima mahasiswa tersebut. Saya cek ke Kapolri agar mereka yang ditahan di Madura segera dibebaskan. Karena mereka tidak boleh dilanjutkan karena mereka harus menjadi pemimpin ide.</p> <p>5) Kedepan, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra berpesan agar konsep kuliah <i>online</i> terus dimatangkan. Menurutnya di masa depan kuliah <i>online</i> khususnya untuk pendidikan tinggi menjadi sistem yang tidak bisa terpisahkan. Kuliah <i>online</i> harus terus diperbaiki karena kedepannya diprediksi menjadi model Pendidikan ke depan.</p> <p>Tanggapan Ketua komisi X DPR RI:</p> <p>1) Ketua Komisi X DPR RI mengatakan sepakat dengan pandangan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra untuk menajamkan penggunaan alokasi 20% dana pendidikan APBN untuk fungsi pendidikan. Menurutnya saat ini sebagian besar alokasi dana pendidikan diwujudkan dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) yang belum</p>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT
			<p>tentu penggunaannya untuk fungsi pendidikan. Isu-isu besar yang diamanatkan oleh Wakil Ketua DPR RI/Korkesra seperti refocusing ulang anggaran Pendidikan 20% APBN memang harus segera ditindaklanjuti. Karena faktanya dari 20% dana Pendidikan hanya 85 Triliun dikelola kemendikbud dan 55 Triliun dikelola kemenag. Sisanya 370 Triliun jadi DAK diserahkan ke pemerintah daerah. Kami tidak bisa mengontrol penggunaannya.</p> <p>2) Saat ini Komisi X DPR RI berusaha mendorong Kemendikbud dan Kemenag agar seluruh atau minimal 50% dari total anggaran fungsi pendidikan bisa dikelola oleh Kemendikbud/Kemenag. Solusi yang ditawarkan adalah <i>'Money Follow Student'</i> sehingga indeks biaya pemerintah diberikan langsung (direct) kepada mahasiswa dengan tujuan meminimalisir fragmentasi atau diskriminasi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Kami berharap konsep <i>money follow student</i> ini bisa diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini sedang dimatangkan di Komisi X.</p>

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Panja Diplomasi Luar Negeri	Penanggulangan Covid-19 Komisi I DPR RI.	Rapat Intern	
2	Kunjungann kerja di Provinsi NTB	Program pembangunan infrastruktur TIK dan Internet BAKTI di Provinsi NTB.	Kunjungann kerja Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk mengetahui program pembangunan infrastruktur TIK dan Internet BAKTI untuk meningkatkan Pendidikan dan pelayanan publik di Provinsi NTB.	
3	Kunjungan Kerja di Bali	Infrastruktur penyiaran pendukung migrasi analog switch off (ASO) di Bali	Kunjungann kerja Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk mengetahui	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			perkembangan penyediaan infrastruktur penyiaran pendukung migrasi analog switch off (ASO) di Bali.	
4	Kunjungan kerja reses ke Korem 131/Santiago Menado dan Binda Sulawesi Utara	---	Kunjungan kerja reses ke Korem 131/Santiago Menado dan Binda Sulawesi Utara untuk mengetahui dukungan Korem 131/Santiago dalam pelaksanaan vaksinasi di Sulut, kondisi kesejahteraan prajurit saat ini dan kebutuhan idealnya, ketersediaan, kebutuhan, dan perawatan Alutsista untuk menjaga kedaulatan NKRI, antisipasi perkembangan tantangan dan ancaman di wilayah Sulut serta mengetahui dukungan binda Sulut dalam pelaksanaan vaksinasi di Sulut, deteksi dini pergerakan kelompok radikal dan terorisme di Sulut, deteksi dini terhadap peredaran narkoba dan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			senjata ilegal di Sulut, dan deteksi dini arus keluar masuk barang dan orang di perbatasan antara Sulut dengan Filipina Selatan.	
5	Kunjungan kerja reses ke Binda Sulawesi Selatan	---	Kunjungan kerja reses ke Binda Sulawesi Selatan untuk mengetahui deteksi dini dan analisis pergerakan kelompok radikal dan teroris serta pengganggu keamanan di Sulsel, deteksi dini dan analisis pengaruh kebijakan vaksin terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional tahun 2021, dan laporan kinerja Binda Tahun 2020 dan 2021 serta hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tupoksi.	
6	Kunjungan kera reses ke Kodam XVII/ Cenderawasih dan Binda Papua	---	Kunjungan kera reses ke Kodam XVII/ Cenderawasih dan Binda Papua untuk mengetahui kesiapan Kodam XVII/ Cenderawasih dalam menangkal ancaman separatism dan mendukung	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pengamanan dalam pelaksanaan PON XX tahun 2021 di Provinsi Papua, serta kesiapan Binda Papua dalam melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman separatisme serta gangguan keamanan dalam pelaksanaan PON XX tahun 2021 di Provinsi Papua.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

1. RUU TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (*SELANJUTNYA DISEBUT RUU TENTANG KEJAKSAAN*)

Pada tanggal 8 April 2021, Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus **menyetujui** bahwa dalam rangka efisiensi/mempersingkat waktu proses pembahasan RUU dimaksud, apabila Surat Presiden RI mengenai Menteri yang ditugaskan untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tentang Kejaksaan telah diterima oleh DPR RI, maka **dapat langsung** ditugaskan kepada Komisi III DPR RI untuk membahas RUU dimaksud **tanpa** penugasan Bamus kembali. Rapat Paripurna tanggal 9 April 2021 memutuskan bahwa **menyetujui** RUU tentang Kejaksaan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR dan akan dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal 17 September 2021 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 belum dikeluarkan Surat Presiden, sehingga Komisi III DPR RI belum dapat melaksanakan Pembahasan RUU tentang Kejaksaan berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 April 2021.

2. RUU TENTANG PENYADAPAN

Berdasarkan Keputusan Rapat Intern tanggal 18 Agustus 2021 dan berdasarkan Prolegnas Jangka Panjang 2019-2024, bahwa pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 Komisi III DPR RI akan menyusun RUU tentang Penyadapan. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi III DPR RI telah mengundang Badan Keahlian DPR (BKD) guna mendengarkan Penjelasan Kepala BKD sebagai perumus RUU tentang Penyadapan pada tanggal 8 September 2021.

Dalam pertemuan dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI menyampaikan beberapa hal :

- a. Pengaturan yang berbeda dalam pelaksanaan penyadapan di berbagai undang-undang. Ada perbedaan pengaturan mengenai mekanisme penyadapan dan jangka waktu pelaksanaan penyadapan, yang dilakukan oleh Penyidik Polri, BNN, KPK, dll
- b. Ada beberapa peraturan mengenai penyadapan di berbagai undang-undang.
- c. Penyadapan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu
- d. Penyadapan yang akan dilakukan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan terkait dengan penyadapan dalam UU ini, penetapan diajukan kepada Ketua MA
- e. Penyadapan untuk tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme tidak memerlukan penetapan ketua pengadilan negeri. Penyadapan dalam keadaan mendesak, seperti:
 - potensi terjadi bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius;
 - telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - telah terjadi permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi
- f. Hasil Penyadapan:
 - Hasil Penyadapan bersifat rahasia
 - Penggunaan hasil Penyadapan dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan kepentingan penegakan hukum. (Proporsional: penggunaan informasi sesuai dengan lingkup tindak pidana yang dijadikan dasar permintaan untuk melakukan Penyadapan)
 - Penyimpanan hasil penyadapan paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang melalui penetapan pengadilan
 - Aparat Penegak Hukum harus memusnahkan hasil Penyadapan yang tidak berkaitan dan tidak sesuai dengan kepentingan penegakan hukum paling lambat 30 hari terhitung sejak selesai masa penyimpanan hasil Penyadapan.

Dalam Rapat tersebut Komisi III DPR RI memberikan catatan kepada Badan Keahlian agar dapat memperbaiki Naskah Akademik dan draf RUU atas masukan Anggota Komisi III DPR RI sebagai berikut:

- a. Perlu penegasan atas lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan untuk menghindari terjadinya *misuse*;
- b. Terkait dengan tahapan penyadapan, perlu diperjelas lagi tahapannya seperti apa karena penyadapan harus dalam proses upaya memaksa dan pasti akan ada HAM yang dilanggar untuk kepentingan penegakan hukum;
- c. Dalam UU agar menunjuk suatu badan atau lembaga yang akan bertugas atau berwenang untuk mengawasi atau melakukan *audit* kinerja dari lembaga hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan;
- d. Terkait dengan durasi penyimpanan hasil penyadapan, mohon dijelaskan siapa yang memberi perintah untuk penghapusan data hasil penyadapan tersebut selama maksimal 2 (dua) tahun. Selain itu, durasi 2 (dua) tahun terlalu cepat untuk dilakukan penghapusan data hasil penyadapan karena beberapa kasus berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, kemungkinan 5 (lima) tahun;
- e. Perlu diperjelas tujuan penyadapan dalam UU, dalam konteks apa, jenis tindak pidana apa yang dapat dilakukan penyadapan, dan kapan penyadapan dapat dilakukan;
- f. Lebih mempertajam rumusan RUU terkait penyadapan;
- g. saat melakukan penyusunan RUU terkait penyadapan ini, diawali dengan politik hukumnya terlebih dahulu, kemudian menyepakati *standing point* dan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan;
- h. Perlu disebutkan batasan yang ketat untuk melakukan Penyadapan;
- i. Terkait pemusnahan data hasil penyadapan, jangka waktu 2 (tahun) sudah tepat, dengan catatan tambahan jika ada kebutuhan penegakan hukum lanjutan terhadap hasil penyadapan tersebut maka jangka waktunya dapat

diperpanjang. Penambahan jangka waktu penyimpanan hasil penyadapan untuk kepentingan pengembangan juga perlu ditentukan kembali dan saat kasus selesai hasil penyadapan bisa dimusnahkan.

Untuk mendapatkan masukan yang berkaitan dengan substansi RUU tentang Penyadapan, Komisi III DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Amerika Serikat pada tanggal 2 sd 8 November 2021.

3. RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*), SELANJUTNYA DISEBUT RUU TENTANG *MLA IN CRIMINAL MATTERS*

Berdasarkan surat Presiden Nomor B-27/Pres/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 dan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Juli 2021, menyetujui pembahasan terhadap RUU tentang *MLA in Criminal Matters* diserahkan kepada Komisi III DPR RI.

Komisi III DPR RI melalui surat Pimpinan DPR RI Nomor LG/10366/DPR RI/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 mengundang Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Luar Negeri RI membahas RUU tentang *MLA in Criminal Matters* pada tanggal 23 Agustus 2021. Menkumham RI membalas surat undangan dengan Nomor M.HH.PR.05.01-29 tanggal 20 Agustus 2021 meminta penundaan Rapat Kerja.

Komisi III DPR RI akan mengundang kembali Menkumham dan Menlu dengan Nomor Surat LG/01.01/10785/DPR RI/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, untuk melaksanakan Rapat Kerja pada tanggal 01 September 2021 dengan Agenda penjelasan Pemerintah atas RUU tentang *MLA in Criminal Matters*, Pandangan Umum Fraksi-fraksi, Penyerahan dan pembahasan DIM, rencana kerja, Pembentukan Panja, dan lain-lain.

Pada tanggal 02 sd 03 September 2021 Panja membahas DIM dan menyusun Laporan Panja, kemudian tanggal 06 September 2021 diadakan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham RI dan Menlu RI dengan agenda Laporan

Panja, pendapat akhir mini fraksi, penandatanganan RUU, dan pengambilan Keputusan. Dalam Raker tersebut diputuskan bahwa menyetujui RUU tentang *MLA in Criminal Matters* dan akan dibawa dalam Pengambilan Keputusan Tk. II dalam Rapat Paripurna terdekat guna mendapatkan persetujuan RUU tentang *MLA in Criminal Matters* sebagai Undang-Undang.

4. RUU TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 3 Agustus 2021 dan dituangkan kedalam surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/11469/DPR RI/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, Komisi III DPR RI mendapatkan penugasan untuk melakukan Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata. Dalam Surat Presiden Nomor R-35/Pres/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021, menugaskan Menteri Hukum dan HAM RI untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR RI tanggal 14 September 2021 bahwa Komisi III DPR RI akan membahas RUU tentang Hukum Acara Perdata pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

Sesuai Siklus pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2020 dan sesuai dengan siklus pembahasan RUU tentang APBN TA 2022 dari Badan Anggaran serta Keputusan Rapat Intern tanggal 18 Agustus 2021 bahwa Komisi III DPR RI tidak lagi melaksanakan rapat fungsi anggaran dikarenakan sudah memutuskan anggaran mitra kerja beserta tambahannya. Dalam hal ini Komisi III DPR RI mengirim surat kepada Mitra Kerja untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2020, HAPSEM BPK Semester I dan II TA 2020, dan Penyempurnaan RKA K/L TA 2022, setelah itu Komisi III DPR RI mengirimkannya kepada Badan Anggaran.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RAPAT KONSULTASI KOMISI III DPR RI DENGAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, tanggal 30 Agustus 2021.	<i>Membahas:</i> 1. Evaluasi terhadap tugas dan wewenang serta kinerja penyelesaian perkara di MA RI; 2. Penyelenggaraan <i>e-court</i> , <i>e-filing</i> , dan <i>e-litigation</i> ; dan 3. Kebutuhan calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada MA.	Ketua MA menanggapi apresiasi dan saran maupun pertanyaan: a. Beban penanganan perkara, setuju dengan aturan atau langkah untuk mengurangi beban perkara kasasi. b. Akan mengingatkan oknum Hakim mengenai pandangan atau pendapat politik secara terbuka, c. Untuk perbaikan rumah dinas, gedung, dan berbagai fasilitas di daerah akan terus menjadi perhatian. d. Soal kebutuhan hakim pajak menjadi permasalahan tersendiri selain karena kompetensi, terjadi kendala di aturan dimana hakim agung harus berlatar belakang pendidikan hukum yang tidak dimiliki	Rapat Konsultasi dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI/KOREKKU, setelah itu rapat dilanjutkan oleh pimpinan Ketua Komisi III DPR RI.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>hakim pajak pada umumnya.</p> <p>e. Penganggaran untuk <i>e-court</i> telah ada namun masih terkendala keterbatasan.</p> <p>f. Saat ini MA telah merencanakan untuk prioritas alokasi anggaran untuk pembentukan kantor pengadilan terutama di wilayah yang belum memiliki kantor pengadilan. Termasuk dalam hal alokasi fasilitas di daerah hingga rumah dinas.</p> <p>g. Mengenai polemik publik “diskon putusan”, hal ini merupakan independensi dari hakim yang menangani perkara ini. MA sudah memberikan <i>sentencing guidelines</i> untuk perkara tersebut, namun harus</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>menghormati kebebasan hakim. Contohnya putusan terhadap Jaksa Pinangki, memang sangat bergantung pada seluruh faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan.</p> <p>h. Terkait dengan hakim ad hoc tipikor yang akan segera masuk masa pensiun, hingga saat ini memang masih dapat dilakukan, namun memerlukan perhatian karena akan segera berakhir. Menurut aturan hanya dua periode yang dapat diberikan. Sudah diupayakan untuk dimintakan perpanjangan pada Presiden namun masih dalam situasi terbentur oleh aturan. Berharap agar KY juga dapat</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>segera mengisi kekurangan.</p> <p>i. Persoalan eksekusi diakui memang terkadang menjadi permasalahan, seperti biaya dan kendala teknis lainnya. Komitmen ketua pengadilan negeri untuk eksekusi cukup tinggi namun dihambat oleh berbagai kendala seperti upaya hukum dan biaya teknis tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi atau terobosan bersama untuk hal eksekusi, termasuk aturan soal kewenangan dan upaya paksa.</p> <p>j. Kebutuhan hakim agung memang sangat urgen mengingat peningkatan jumlah perkara. Selain itu, jumlah hakim agung yang memasuki usia</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pensiun juga semakin bertambah.</p> <p>k. MA telah memiliki SiWas untuk menerima pengaduan masyarakat.</p> <p>l. Soal ribut di ruang publik soal anggaran, memang terkesan dilebih-lebihkan dan mungkin masih membutuhkan penjelasan ke publik.</p> <p>m. IT di seluruh pengadilan telah dipersiapkan bahkan jauh sebelum masa pandemi.</p> <p>n. Hakim tinggi memang banyak yang telah memasuki usia pensiun di berbagai wilayah sehingga rumah dinas memang membutuhkan banyak perhatian.</p> <p>o. Mengenai ruang sidang yang masih terbatas di wilayah. Hal ini kadang terjadi karena memang keterbatasan tidak</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>hanya di pengadilan namun juga di rumah tahanan. Namun akan diupayakan untuk ditambah.</p> <p>p. Mengharapkan agar pertemuan rutin dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja.</p> <p>q. Soal kehumasan, memang pada saat yang lalu terkendala karena kepala humasnya meninggal karena Covid-19 namun sekarang sudah terisi.</p> <p>r. Menanggapi soal rasa keadilan, memang perlu mendengarkan suara publik namun bukan menjadi satu-satunya pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Ketidakpuasan oleh pihak tertentu dapat dilakukan upaya hukum.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN LPSK , tanggal 8 September 2021.	<i>Membahas:</i> 1. Grand Strategy LPSK. 2. Evaluasi kinerja tahun 2019-2020 dan upaya membangun kerja sama yang sinergis dan harmonis.	<i>Kesimpulan:</i> 1. <i>Komisi III DPR RI meminta LPSK untuk bekerja lebih optimal dengan terus meningkatkan kerja sama dengan seluruh stakeholders terkait sehingga mampu mengantisipasi tantangan perlindungan saksi dan korban yang semakin kompleks.</i> 2. <i>Komisi III DPR meminta LPSK untuk memperkuat kapasitas seluruh SDM khususnya yang terlibat langsung dan bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan dan perlindungan saksi dan korban dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.</i> 3. <i>Komisi III DPR RI meminta LPSK untuk lebih proaktif dalam</i>	Rapat dilaksanakan secara fisik & virtual.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban terutama berkaitan dengan kasus-kasus yang menarik perhatian publik antara lain kasus narkoba.</p>	
3.	<p>RAPAT PANJA PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM KOMISI III DPR RI, tanggal 13 September 2021</p>	<p><i>Membahas:</i> 1. Bidang Pengawasan; 2. Rencana Kerja; 3. Lain-lain</p>	<p><i>Kesimpulan:</i> 1. Panja akan melaksanakan RDP, RDPU dengan pihak-pihak terkait, maupun kunjungan kerja spesifik; 2. Dalam waktu dekat, Panja akan melaksanakan RDP dengan Kabareskrim, Dirlitidsus, dan Karowassidik membahas mengenai pemulihan ekonomi nasional.</p>	
4.	<p>RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA BNPT, tanggal 15 September 2021.</p>	<p><i>Membahas:</i> 1. Evaluasi kinerja 2. Penindakan dan pengungkapan kasus</p>	<p><i>Kesimpulan:</i> 1. KOMISI III DPR RI mendesak Kepala BNPT agar melakukan penguatan fungsi</p>	<p>Rapat dilaksanakan secara fisik & virtual.</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>3. Kebijakan, strategi dan program BNPT</p>	<p><i>intellijen atau deteksi dini sebagai upaya pencegahan terhadap aksi teror serta melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga, Organisasi Keagamaan, Lembaga Internasional dan instansi terkait lainnya.</i></p> <p>2. <i>Komisi III DPR RI meminta Kepala BNPT agar melakukan penelusuran secara ketat terhadap aliran dana yang diduga digunakan untuk penggunaan kegiatan terorisme sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme dengan melibatkan PPATK, Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan</i></p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<i>kerja sama internasional.</i>	
5.	KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI	Dalam rangka Pengawasan Penegakan Hukum Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, pada tanggal 10 s.d. 12 September 2021, ke : 1. Provinsi Bali 2. Provinsi NTB	Komisi III DPR RI berharap akan mendapatkan data, informasi dan masukan dari instansi terkait sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan persoalan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Bali dan di Provinsi NTB, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat di masa pandemi ini.	- Pimpinan Tim Bali: Bp Ahmad Sahroni. - Pimpinan Tim NTB; Bp. Herman Hery Anggota Tim: proporsional masing-masing fraksi.

D. TUGAS KHUSUS

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 September 2021, Komisi III DPR RI mendapat penugasan untuk membahas Calon Hakim Agung Tahun 2021. Atas dasar itu maka Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Intern pada tanggal 14 September 2021 guna membahas mekanisme pembahasan Calon Hakim Agung tersebut.

MS I Tahun Sidang 2021-2022
(10 Agustus 2021 – 21 September 2021)

Dalam Rapat Intern diputuskan bahwa pada tanggal 17 September 2021 akan dilaksanakan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah oleh 11 Calon Hakim Agung, kemudian diteruskan pertemuan dengan Komisi Yudisial selaku penyelenggara rekrutmen Calon Hakim Agung Tahun 2021. Informasi publik atau publikasi ke 3 media massa dan media sosial, yaitu Kompas, Media Indonesia, Republika dan Detik.com pada tanggal 18 sd 19 September 2021.

Pelaksanaan Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap 11 orang Calon Hakim Agung Tahun 2021 pada tanggal 20 sd 21 September 2021 dilanjutkan dengan Rapat Intern Komisi III DPR RI dengan agenda Pandangan Fraksi-fraksi atas Persetujuan Nama Calon Hakim Agung Tahun 2021.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU MIGAS	Rapat Intern		

Catatan:

- Rapat Intern Komisi VII DPR RI dengan Kepala BKD akan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2021 ditunda menjadi tanggal 13 September dengan agenda Presentasi Draft RUU Migas

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Eselon I Kementerian Perindustrian (Sekjen, Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Irjen, Dirjen Industri Agro dan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Elektronika	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Program Pelaksanaan Kegiatan TA. 2021 b. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2022	-

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	<p>Eselon I Kementerian Perindustrian (Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka; Dirjen Ketahanan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional; Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri serta Kepala BPSDM Industri)</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah</p>	<p>a. Program Pelaksanaan Kegiatan TA. 2021 b. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2022</p>	
3.	<p>Eselon I Kementerian ESDM (Sekjen, Irjen, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Kepala BPH Migas, dan BPMA)</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah</p>	<p>a. Program Pelaksanaan Kegiatan TA. 2021 b. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2022</p>	
4.	<p>Eselon I Kementerian ESDM (Dirjen Minerba, Kepala Badan Geologi, Kepala BPSDM, Kepala Balitbang ESDM, dan Sekjen DEN)</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah</p>	<p>a. Program Pelaksanaan Kegiatan TA. 2021 b. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2022</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Kepala BRIN, Kepala BAPETEN, dan Kepala BIG	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Program Pelaksanaan Kegiatan TA. 2021 b. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2022 c. Penetapan RKA-K/L TA. 2022	
6.	Eselon I Kementerian ESDM (Sekjen, Irjen, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirjen Minerba, Badan Geologi, Kepala Kepala BPSDM, Kepala Balitbang ESDM, Kepala BPH Migas, BPMA, dan Sekjen DEN)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Melanjutkan a. Program Pelaksanaan Kegiatan TA. 2021 b. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2022	
7.	Menteri Perindustrian	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Penetapan RKA-K/L TA. 2022	
8	Menteri ESDM	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	1. Penetapan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RAPBN TA. 2022	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. Penetapan RKA-K/L TA 2022	

Catatan:

- Sesuai dengan Surat Badan Anggaran Nomor AG/09356/DPR RI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan Nomor AG/09710/DPR RI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal : Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA.2020 dan Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2022

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Dirjen Migas Kementerian ESDM RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Pembahasan mengenai gas bertingkat berdasarkan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2016	
2.	a. Eselon I Kementerian ESDM b. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Kontribusi sektor ESDM terhadap penerimaan negara dalam 3 tahun terakhir b. sumber-sumber penerimaan negara sektor ESDM	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			c. Profil penerimaan negara dalam 5 tahun terakhir	
3.	Kepala dan Anggota Komite BPH Migas	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Program strategis BPH Migas 2021-2025 b. Progres, Kendala, dan solusi percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pipa	
4.	Sekjen dan Dirjen Migas Kementerian ESDM	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Penjelasan terkait Permen ESDM No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada kegiatan Usaha Hilir Migas	
5.	Duta Besar Denmark	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Courtesy Call 1. Penjelasan INDODEPP 2. Update RUU EBT 3. Kemungkinan kerja sama Komisi VII DPR RI dengan Kedutaan Denmark untuk Energi Bersih	
6.	Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dan	a. Pelaksanaan undang-undang;	1. Kepastian pasokan alat Kesehatan dan obat-	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> obatan dalam rangka penanganan Covid-19 2. Perkembangan Industri Petrokimia 3. Nilai output Industri Kecil dan Menengah terhadap Industri Nasional 4. Kebijakan Pemerintah terhadap Ketahanan Industri pada masa pandemic Covid-19 5. Lain-lain 	
7	Kunjungan Kerja Spesifik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Banten (Peninjauan ke PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. di Cilegon) 2. Provinsi Jawa Barat (Peninjauan ke PT Len Industri di Bandung) 3. Provinsi Bali (Peninjauan Kebon Raya Eka Karya LIPI di Bedugul) 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Rapat Intern Komisi 1. Surat Pimpinan DPR RI tentang Penugasan untuk Membahas RUU tentang SKN. 2. Menyusun Program Kerja (Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Anggaran) Komisi X DPR RI MS I TS 2021-2022. 3. Rencana Kunker Spesifik, Kunker Panja Legislasi, Kunker Panja Pengawasan dan Kunker Reses Komisi X DPR RI pada MS I TS 2021-2022. 4. Lain-lain	1. Komisi X DPR RI menjadwalkan rapat kerja dan rapat-rapat Panja RUU SKN dengan Kemenpora RI dan K/L lain sesuai surpres dan surat Pimpinan DPR untuk memulai pembahasan RUU SKN. 2. Komisi X DPR RI melanjutkan pendalaman terhadap substansi RUU tentang Praktik Psikologi dengan pemangku kepentingan bidang psikologi.	Surpres No.R-29/Pres/06/2021 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan atas UU No.3 Tahun 2005 tentang SKN. Surat No.PW/09442/DPR RI/VII/2021 perihal Penugasan untuk Membahas RUU tentang SKN

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Perpusnas RI	RDP 26 Agustus 2021 1. Pembahasan RKA K/L TA 2022 2. Pembahasan Program-Program yang akan didanai oleh DAK	1. Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Perpusnas RI pada RAPBN TA 2022 sebesar Rp.667.521.289.000,- 2. Terhadap usulan DAK Sub bidang perpustakaan daerah, Komisi X DPR RI menyetujui pagu DAK RAPBN TA 2022 sebesar Rp549.998.235.000 dengan target 1.208 usulan dari 449 daerah terdiri dari 86 usulan dari 31 Provinsi dan 1122 usulan dari 418 Kabupaten/Kota.	
2.	Kemendikbudristek RI	Raker 31 Agustus 2021 1. Pembahasan RKA K/L TA 2022 2. Pembahasan Program-Program yang akan didanai oleh DAK	3. Pagu sementara berdasarkan Nota Keuangan RAPBN TA 2022 sebesar Rp72.994.908.331.000,- 4. Mendikbudristek RI mengajukan usulan tambahan pagu sebesar Rp9.940.554.295.000,-	Komisi X DPR RI akan melakukan pendalaman melalui RDP.
3.	Kemenpora RI	Raker 31 Agustus 2021 1. Pembahasan RKA K/L TA 2022 2. Pembahasan Program-Program yang akan didanai oleh DAK	1. Kemenpora RI menyampaikan alokasi pagu sementara pada RAPBN TA 2022 sebesar 1.948.783.392.000. 2. Kemenpora RI menyampaikan usulan perubahan Pagu Antar-Program dan Antar-Fungsi pada RAPBN TA 2022 tanpa merubah pagu sementara.	Komisi X DPR RI akan melakukan pendalaman melalui RDP

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Kemenparekraf/Ba parekraf RI	Raker 1 September 2021 1. Pembahasan RKA K/L TA 2022 2. Pembahasan Program-Program yang akan didanai oleh DAK	1. Kemenparekraf/Baparekraf RI menyampaikan pagu sementara pada RAPBN TA 2022 sebesar Rp3.792.417.902.000. 2. alokasi anggaran DAK TA 2022 bidang pariwisata sebesar Rp877,9 Miliar	Komisi X DPR RI akan melakukan pendalaman dalam bentuk RDP

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemendikbudrist ek RI	Rapat Intern Komisi 1. Menyusun Program Kerja (Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Anggaran) Komisi X DPR RI MS I TS 2021-2022. 2. Rencana Kunker Spesifik, Kunker Panja Legislasi, Kunker Panja Pengawasan dan Kunker Reses Komisi	1. Tindak lanjut dari Pembentukan Panja Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Komisi X DPR RI akan melakukan pengawasan atas kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. 2. Komisi X DPR RI akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kebijakan Sekolah Penggerak dalam bentuk Kunjungan Spesifik.	Pengawasan dilakukan dalam bentuk RDP, RDPU dan Kunjungan Spesifik

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		X DPR RI pada MS I TS 2021-2022. 3. Lain-lain (18 Agustus 2021)		
		Pendalaman Atas Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/LHP APBN TA 2020 (25 Agustus 2021)	1. Komisi X DPR RI ingin mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai realisasi anggaran TA 2020, penambahan anggaran Pagu DIPA secara keseluruhan dan pergeseran anggaran masing-masing eselon I/unit utama serta dampaknya terhadap capaian program prioritas nasional maupun program kementerian 2. Komisi X DPR RI meminta penjelasan atas temuan dalam LHP BPK atas program Kemendikbudristek RI seperti, Pengelolaan PIP, Kuota Internet Belajar, penyaluran BSU dan Mekanisme Penyaluran Dana BOS	
		Penyampaian Laporan Panja PGTKH-ASN Kepada Mendikbudristek RI (31 Agustus 2021)	Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI telah menyelesaikan penugasannya dalam pengawasan bidang pendidikan khusus GTK Honorer pasca penetapan Program 1 Juta Guru PPPK dan merumuskan rekomendasi kepada Pemerintah untuk penyelesaian GTK Honorer menjadi ASN.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Dalam laporan Panja PGTKH-ASN merumuskan beberapa rekomendasi berupa rekomendasi kebijakan umum, anggaran, kebijakan formasi baru dan afirmasi seleksi yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan guru dan menghasilkan guru berkualitas yang sejahtera	
2.	Kemenpora RI	Pendalaman Atas Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/LHP APBN TA 2020 (31 Agustus 2021)	Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Menpora RI atas capaian Opini BPK Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 (dua) tahun berturut-turut (2019-2020), serta capaian realisasi 95,14% atau sebesar Rp1.114.645.758.311,- (<i>satu triliun seratus empat belas miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah</i>) dari pagu APBN TA 2020	
3.	Kemenparekraf/Beparekraf RI	Rapat Intern Komisi 1. Menyusun Program Kerja (Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Anggaran) Komisi X DPR RI MS I TS 2021-2022.	Tindak lanjut dari Pembentukan Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik, Komisi X DPR RI akan melakukan pengawasan atas kebijakan Kementerian dalam upaya pengembangan potensi Desa Wisata dan Kampung Kreatif.	Pengawasan dilakukan dalam bentuk RDP, RDPU dan Kunjungan Spesifik

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>2. Rencana Kunker Spesifik, Kunker Panja Legislasi, Kunker Panja Pengawasan dan Kunker Reses Komisi X DPR RI pada MS I TS 2021-2022.</p> <p>3. Lain-lain</p> <p>(18 Agustus 2021)</p>		
4.	Perpustakaan Nasional RI	<p>Pendalaman Atas Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/LHP APBN TA 2020</p> <p>(26 Agustus 2021)</p>	<p>Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Perpustakaan RI atas capaian Nilai Kerja Anggaran (NKA) 95,86 (sangat baik) dan Opini BPK Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2016-2020), serta capaian realisasi 96,62 % atau sebesar Rp439.399.016.449,- (<i>empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah</i>) dari pagu APBN TA 2020</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RDPU Panja RUU HKPD dengan: - Ketua Umum HKTI - Ketua Umum APPSI	Mendapatkan masukan mengenai RUU tentang Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Materi terlampir	Rapat tanggal 2 September 2021
2.	Rapat Kerja dengan: 1. Menteri Keuangan RI 2. Menteri Hukum dan HAM RI 3. Menteri Dalam Negeri 4. Menteri PPN/Kepala Bappenas 5. DPD RI	1. Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pemerintah Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Pandangan DPD RI;	Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyepakati : 1. Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI telah memperoleh penjelasan dari Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang HKPD). 2. Fraksi-Fraksi dan Komite IV DPD RI telah menyampaikan pandangan atas	Rapat tanggal 13 September 2021

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		4. Pengesahan Mekanisme dan Jadwal Acara Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang HKPD, dan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah. 3. Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI akan menyampaikan dokumen Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Pemerintah pada hari Senin tanggal 20 September 2021. 4. Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI bersama Pemerintah sepakat akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai substansi RUU tentang HKPD dalam rapat Panitia Kerja.	
3.	Rapat Kerja dengan: 1. Menteri Keuangan RI 2. Menteri Hukum dan HAM RI 3. DPD	1. Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Pandangan Fraksi-fraksi atas Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang	Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM menyepakati : 1. Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI telah memperoleh penjelasan dari Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU tentang KUP).	Rapat tanggal 13 September 2021

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</p> <p>3. Mendengarkan Pertimbangan DPD RI</p>	<p>2. Fraksi-Fraksi dan Komite IV DPD RI telah menyampaikan pandangan atas penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang KUP dan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah.</p> <p>3. Komisi XI DPR RI telah menyampaikan dokumen Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Pemerintah dan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di dalam Panitia Kerja (Panja).</p> <p>4. Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai substansi RUU tentang KUP dalam Rapat Panitia Kerja</p>	
4.	Rapat Panja RUU KUP Komisi XI dengan Tim Panja RUU KUP Wakil Pemerintah	Membahas DIM RUU tentang Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	Materi terlampir	Rapat tanggal 15 September 2021
5.	Rapat Panja RUU KUP Komisi XI dengan Tim	Membahas DIM RUU tentang Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun	Materi terlampir	Rapat tanggal 16 September 2021

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Panja RUU KUP Wakil Pemerintah	1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.		

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas	1. Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020. 2. Pembahasan RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2022	Komisi XI DPR RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyepakati : 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan laporan capaian akuntabilitas dan laporan kinerja tahun 2020 dan rencana kerja anggaran tahun 2022. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Kementerian PPN/Kepala Bappenas untuk APBN TA 2020 dan WTP yang ke-13 secara berturut-turut.	Rapat tanggal 1 September 2021

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Kementerian PPN/Bappenas akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan kementerian PPN/Bappenas tahun 2020, secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>4. Menteri PPN/Kepala Bappenas akan mengoptimalkan fungsi pengendalian dalam memastikan arah pelaksanaan program pemerintah pusat di setiap K/L tahun 2022 sejalan dengan reformasi struktural dan belanja K/L yang berkualitas “<i>spending better</i>”.</p> <p>5. Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan fungsi dan kewenangannya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional akan menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.</p> <p>6. Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Perencanaan</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN												
			<p>Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) TA 2022 sebesar Rp1.375.897.199.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <p style="text-align: right;">(dalam ribu rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1279 724 1877 983"> <thead> <tr> <th data-bbox="1279 724 1352 788">NO</th> <th data-bbox="1352 724 1693 788">PROGRAM</th> <th data-bbox="1693 724 1877 788">PAGU ANGGARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1279 788 1352 852">1.</td> <td data-bbox="1352 788 1693 852">Program Perencanaan Pembangunan Nasional</td> <td data-bbox="1693 788 1877 852">746.615.338</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1279 852 1352 916">2.</td> <td data-bbox="1352 852 1693 916">Program Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1693 852 1877 916">629.281.861</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1279 916 1693 983" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td data-bbox="1693 916 1877 983">1.375.897.199</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Menteri PPN/Kepala Bappenas akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dalam jangka waktu 7 hari kerja.</p>	NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	1.	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	746.615.338	2.	Program Dukungan Manajemen	629.281.861	Jumlah		1.375.897.199	
NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN														
1.	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	746.615.338														
2.	Program Dukungan Manajemen	629.281.861														
Jumlah		1.375.897.199														

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Rapat Dengar Pendapat dengan 1. Kepala Badan Pusat Statistik 2. Kepala LKPP	1. Pembahasan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2020. 2. Pembahasan RKA Badan Pusat Statistik dalam RUU APBN Tahun 2022	Komisi XI DPR RI dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyepakati: 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan laporan capaian akuntabilitas dan laporan kinerja tahun 2020, semester I 2021, dan Rencana Kerja Anggaran tahun 2022. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk APBN TA 2020. 3. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2020, secara efektif dan komprehensif	Rapat tanggal 1 September 2021

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>4. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menjalankan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan belanja pada anggaran tahun 2022, akan diarahkan secara optimal untuk mencapai reformasi struktural dan belanja yang efisien, produktif, dan/atau efektif dalam memberikan <i>multiplier effect</i> ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.</p> <p>5. Komisi XI DPR RI mendukung program BPS untuk melaksanakan sensus penduduk 2020 <i>long form</i> pada tahun 2022 agar tersedianya data-data parameter demografi dan perumahan yang dapat digunakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.</p> <p>6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan mengoptimalkan fungsi kebijakan</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN												
			<p>pengadaan barang/jasa pemerintah dalam memastikan arah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>7. Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) TA 2022 sebesar Rp4.691.816.660.000,00 (Empat Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <p style="text-align: right;">(dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1261 948 1879 1238"> <thead> <tr> <th data-bbox="1261 948 1335 1011">NO</th> <th data-bbox="1335 948 1637 1011">PROGRAM</th> <th data-bbox="1637 948 1879 1011">PAGU ANGGARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1261 1011 1335 1110">1.</td> <td data-bbox="1335 1011 1637 1110">Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</td> <td data-bbox="1637 1011 1879 1110">1.631.934.730.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1261 1110 1335 1174">2.</td> <td data-bbox="1335 1110 1637 1174">Program Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1637 1110 1879 1174">3.059.881.930.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1261 1174 1637 1238" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td data-bbox="1637 1174 1879 1238">4.691.816.660.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>8. Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	1.	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.631.934.730.000	2.	Program Dukungan Manajemen	3.059.881.930.000	Jumlah		4.691.816.660.000	
NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN														
1.	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.631.934.730.000														
2.	Program Dukungan Manajemen	3.059.881.930.000														
Jumlah		4.691.816.660.000														

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN												
			<p>(LKPP) TA 2022 sebesar Rp181.457.903.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1274 564 1877 916"> <thead> <tr> <th data-bbox="1279 564 1352 628">NO</th> <th data-bbox="1352 564 1637 628">PROGRAM</th> <th data-bbox="1637 564 1872 628">PAGU ANGGARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1279 628 1352 756">1.</td> <td data-bbox="1352 628 1637 756">Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional</td> <td data-bbox="1637 628 1872 756">65.682.833.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1279 756 1352 852">2.</td> <td data-bbox="1352 756 1637 852">Program Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1637 756 1872 852">115.775.070.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1279 852 1637 916">Jumlah</td> <td data-bbox="1637 852 1872 916">181.457.903.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dalam jangka waktu 7 hari kerja.</p>	NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	1.	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	65.682.833.000	2.	Program Dukungan Manajemen	115.775.070.000	Jumlah		181.457.903.000	
NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN														
1.	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	65.682.833.000														
2.	Program Dukungan Manajemen	115.775.070.000														
Jumlah		181.457.903.000														

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2020. 2. Pembahasan RKA Kementerian Keuangan dalam RUU APBN Tahun 2022 	<p>Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan menyepakati :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan laporan capaian akuntabilitas dan laporan kinerja tahun 2020 dan rencana kerja anggaran tahun 2022. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Keuangan untuk APBN TA 2020 dan WTP yang ke-10 secara berturut-turut. 3. Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2020, secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Menteri Keuangan dengan kewenangannya sebagai Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara, 	Rapat tanggal 2 September 2021

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dalam menetapkan kebijakan, pengendalian, dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, akan mengoptimalkan arah pelaksanaan anggaran pada program pemerintah pusat di setiap K/L pada tahun 2022 sejalan dengan reformasi struktural, belanja K/L yang berkualitas “<i>spending better</i>”, dan memperkuat kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berkualitas.</p> <p>5. Kementerian Keuangan akan memperhatikan kinerja dan tindak lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut : Sinergi digitalisasi sistem IT Pemerintah, Infrastruktur <i>core tax</i>, Satgas BLBI, Piutang Pajak, Efektivitas investasi Pemerintah, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, konsolidasi fiskal 2023, peningkatan <i>tax ratio</i>, dan kualitas belanja Pemerintah.</p> <p>6. Komisi XI DPR RI menyetujui tambahan Dukungan Anggaran sebesar Rp992.779.475.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN										
			<p>Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk memenuhi kebutuhan strategis yang belum terdanai di Pagu Anggaran 2022, sehingga Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2022 yang semula Rp43.020.078.493.000,00 (Empat Puluh Tiga Triliun Dua Puluh Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp44.012.857.968.000,00 (Empat Puluh Empat Triliun Dua Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :</p> <p style="text-align: right;"><i>(dalam milyar rupiah)</i></p> <table border="1" data-bbox="1279 1023 1883 1362"> <thead> <tr> <th data-bbox="1279 1023 1335 1362">NO</th> <th data-bbox="1335 1023 1541 1362">PROGRAM</th> <th data-bbox="1541 1023 1653 1362">PAGU ANGGARAN</th> <th data-bbox="1653 1023 1771 1362">DUK UNG AN ANG GAR AN</th> <th data-bbox="1771 1023 1883 1362">PAG U STL H DUK ANG GAR AN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	DUK UNG AN ANG GAR AN	PAG U STL H DUK ANG GAR AN						
NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	DUK UNG AN ANG GAR AN	PAG U STL H DUK ANG GAR AN										

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT				KETERANGAN	
			1.	Program Dukungan Manajemen	40.088	993	41.081.	
			2.	Program Pengelolaan Belanja Negara	17	0	17	
			3.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2.701	0	2.701	
			4.	Program Kebijakan Fiskal	35	0	35	
			5.	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	178	0	178	
			Total Pagu Anggaran		43.020	993	44.013	
			<p>7. Menteri Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dalam jangka waktu 7 hari kerja.</p>					

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	<p>Rapat Dengar Pendapat dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Jenderal BPK RI 2. Kepala BPKP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Keuangan BPK dan BPKP Tahun 2020. 2. Pembahasan RKA BPK dan BPKP dalam RUU APBN Tahun 2022 	<p>Komisi XI DPR RI dan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan laporan capaian akuntabilitas dan laporan kinerja tahun 2020 dan rencana kerja anggaran tahun 2022 BPK dan BPKP. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk APBN TA 2020 dan WTP yang ke-14 secara berturut-turut dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk APBN TA 2020 dan WTP yang ke-13 secara berturut-turut. 3. Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan menindaklanjuti rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan rekomendasi BPK serta rekomendasi Komisi XI DPR RI atas laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan BPK dan BPKP 	<p>Rapat tanggal 6 September 2021</p>

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tahun 2020, secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan belanja pada tahun 2022, akan diarahkan secara optimal untuk mencapai kualitas belanja yang efisien, produktif, dan efektif dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>5. BPK dan BPKP dalam tugas pemeriksaan atau pengawasan agar ikut mendorong Kementrian/ Lembaga dalam melaksanakan anggaran dan programnya, juga meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada rakyat antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pangan, perumahan, urusan perijinan dan sebagainya.</p> <p>6. Sekjen BPK akan memperhatikan kinerja dan tindak lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut: meningkatkan daya dukung kantor-</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN									
			<p>kantor BPK di daerah, memperkuat pemeriksaan kinerja, tindak lanjut pemeriksaan, dan lain sebagainya.</p> <p>7. Kepala BPKP akan memperhatikan kinerja dan tindak lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut: meningkatkan kualitas perencanaan program K/L, memastikan pelaksanaan program PEN berjalan dengan efektif dan efisien, mendorong kualitas TKDD, dan lain sebagainya.</p> <p>8. Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp3.729.970.350.000,00 (Tiga Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <p style="text-align: right;"><i>(dalam ribu rupiah)</i></p> <table border="1" data-bbox="1279 1099 1883 1372"> <thead> <tr> <th data-bbox="1279 1099 1352 1182">NO</th> <th data-bbox="1352 1099 1637 1182">PROGRAM</th> <th data-bbox="1637 1099 1883 1182">PAGU ANGGARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1279 1182 1352 1281">1.</td> <td data-bbox="1352 1182 1637 1281">Program Pemeriksaan Keuangan</td> <td data-bbox="1637 1182 1883 1281">3.101.754.229</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1279 1281 1352 1372">2.</td> <td data-bbox="1352 1281 1637 1372">Program Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1637 1281 1883 1372">628.216.121</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	1.	Program Pemeriksaan Keuangan	3.101.754.229	2.	Program Dukungan Manajemen	628.216.121	
NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN											
1.	Program Pemeriksaan Keuangan	3.101.754.229											
2.	Program Dukungan Manajemen	628.216.121											

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN														
			<table border="1" data-bbox="1279 309 1877 392"> <tr> <td>Total Pagu Anggaran</td> <td>3.729.970.350</td> </tr> </table> <p data-bbox="1279 435 1877 770">Komisi XI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp861.636.732.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: <i>(dalam ribu rupiah)</i></p> <table border="1" data-bbox="1279 770 1877 1082"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PROGRAM</th> <th>PAGU ANGGARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Program Pemeriksaan Keuangan</td> <td>589.892.825</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Program Dukungan Manajemen</td> <td>271.743.907</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Pagu Anggaran</td> <td>861.636.732</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1279 1125 1877 1382">9. Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp1.725.863.324.000,00 (Satu Triliun Tujuh ratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga ratus Dua Puluh</p>	Total Pagu Anggaran	3.729.970.350	NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	1.	Program Pemeriksaan Keuangan	589.892.825	2.	Program Dukungan Manajemen	271.743.907	Total Pagu Anggaran		861.636.732	
Total Pagu Anggaran	3.729.970.350																	
NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN																
1.	Program Pemeriksaan Keuangan	589.892.825																
2.	Program Dukungan Manajemen	271.743.907																
Total Pagu Anggaran		861.636.732																

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN												
			<p>Empat Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: <i>(dalam ribu rupiah)</i></p> <table border="1" data-bbox="1279 419 1877 756"> <thead> <tr> <th data-bbox="1279 419 1352 491">NO</th> <th data-bbox="1352 419 1637 491">PROGRAM</th> <th data-bbox="1637 419 1877 491">PAGU ANGGARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1279 491 1352 587">1.</td> <td data-bbox="1352 491 1637 587">Program Pengawasan Pembangunan</td> <td data-bbox="1637 491 1877 587">431.680.487</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1279 587 1352 683">2.</td> <td data-bbox="1352 587 1637 683">Program Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1637 587 1877 683">1.294.182.837</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1279 683 1637 756">Total Pagu Anggaran</td> <td data-bbox="1637 683 1877 756">1.725.863.324</td> </tr> </tbody> </table> <p>Komisi XI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebesar Rp226.203.108.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah).</p> <p>10. Sekjen BPK dan Kepala BPKP akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dalam jangka waktu 7 hari kerja</p>	NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	1.	Program Pengawasan Pembangunan	431.680.487	2.	Program Dukungan Manajemen	1.294.182.837	Total Pagu Anggaran		1.725.863.324	
NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN														
1.	Program Pengawasan Pembangunan	431.680.487														
2.	Program Dukungan Manajemen	1.294.182.837														
Total Pagu Anggaran		1.725.863.324														

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Kerja dengan Gubernur Bank Indonesia	Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Semester I Tahun 2021	Komisi XI DPR RI bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menyetujui : 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan laporan kinerja dan respon bauran kebijakan Bank Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi Nasional pada semester I tahun 2021. 2. Untuk selanjutnya format presentasi agar menyesuaikan sebagaimana laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia secara triwulanan yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Bank Indonesia. 3. Komisi XI DPR RI mengapresiasi dan mendukung komitmen Bank Indonesia dalam mendukung pembiayaan APBN sehingga dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. 4. Bank Indonesia agar mengambil langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah yang efektif sesuai dengan nilai fundamentalnya.	Rapat tanggal 14 September 2021

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>5. Bank Indonesia agar mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target, serta memperkuat koordinasi kebijakan yang efektif dengan Pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPIP dan TPID).</p> <p>6. Bank Indonesia melalui bauran kebijakan agar mendorong intermediasi perbankan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta mengakselerasi pembiayaan kepada sektor riil, termasuk UMKM, sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional.</p> <p>7. Bank Indonesia terus mendorong terciptanya pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, transmisi kebijakan di sektor keuangan ke sektor riil, serta pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur.</p> <p>8. Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran agar melanjutkan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>digitalisasi sistem pembayaran yang inovatif, aman, efisien dan inklusif.</p> <p>9. Bank Indonesia menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan/ tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI maksimal 7 hari kerja.</p>	
2.	Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisiner OJK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja OJK Semester I Tahun 2021. 2. Refocussing Anggaran OJK Triwulan II s.d IV Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai evaluasi Semester I kinerja OJK dan refocussing anggaran OJK Triwulan II s.d. IV Tahun 2021. 2. Pembahasan lebih lanjut mengenai evaluasi Semester I kinerja OJK dan refocussing anggaran OJK Triwulan II s.d. IV Tahun 2021 akan dijadwalkan kemudian. 	Rapat tanggal 15 September 2021
3.	Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI	Pembahasan terkait Lembaga Pengelola Investasi	<p>Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan selaku Pembina dan Ketua Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority (INA) dan Direktur Utama Indonesia Investment Authority (INA) menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan tentang rencana kerja Indonesia Investment Authority (INA). 	Rapat tanggal 20 September 2021

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. Komisi XI DPR RI mendukung upaya Menteri Keuangan sebagai Pembina dan Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority (INA) untuk meningkatkan investasi Pemerintah Pusat dalam rangka memperkuat perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja.</p> <p>3. Indonesia Investment Authority (INA) dalam mengelola investasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset dalam mendukung pembangunan agar memenuhi prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang profesional, good governance, memiliki kinerja komersial dan manfaat pelayanan publik yang seimbang.</p> <p>4. Indonesia Investment Authority (INA) agar segera meningkatkan kinerjanya dalam mengoptimalkan pemanfaatan investasi aset strategis domestik yang dapat mendukung program pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur, asset recycling BUMN, dan membantu likuiditas</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>BUMN pemilik aset sehingga dapat mengurangi eksposur langsung terhadap APBN.</p> <p>5. Menteri Keuangan agar dapat mensinergikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Indonesia Investment Authority (INA) dalam mengoptimalkan pemenuhan pembiayaan infrastruktur.</p> <p>6. Menteri Keuangan dan Direktur Utama Indonesia Investment Authority (INA) berkomitmen memberikan jawaban tertulis pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI maksimal 7 (tujuh) hari kerja</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI (BALEG)

AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
Badan Legislasi	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="638 419 2141 536">1. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pengesahan jadwal acara rapat-rapat baleb Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022. (tgl 24 Agustus 2021)<li data-bbox="638 536 2141 707">2. RDPU Badan Legislasi DPR RI dengan Aliansi Pekerja/Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) guna mendengarkan masukan atas penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. (tgl 25 Agustus 2021)<li data-bbox="638 707 2141 1126">3. RDPU Badan Legislasi DPR RI dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau, dan Ketua Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) terkait penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran, menyepakati seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh narasumber serta masukan dari Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam Penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. (tgl 01 September 2021)<li data-bbox="638 1126 2141 1359">4. RDPU Badan Legislasi DPR RI dengan Ketua Komite Keuangan dan Anggota Dewan Eksekutif - Chair of Finance Committe dan Member of Executive Council (WFME), Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran

AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	<p>Indonesia (ISMKI) terkait penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran, menyepakati seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh narasumber serta masukan dari Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam Penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. (tgl 01 September 2021)</p>
	<p>5. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan menyepakati seluruh penjelasan yang disampaikan oleh Pengusul RUU (Komisi VII DPR RI) serta masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam Harmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. (tgl 13 September 2021)</p>
	<p>6. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penjelasan Tim Ahli terkait penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. (tgl 15 September 2021)</p>
	<p>7. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM serta PPUU DPD RI dalam rangka evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. (tgl 15 September 2021)</p>
	<p>8. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan menyepakati seluruh penjelasan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU (Komisi II DPR RI) serta masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam harmonisasi 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi.(tgl 16 September 2021)</p>

AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	9. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara RI dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI terkait penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Berakohol menyepakati seluruh penjelasan serta masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan..(tgl 16 September 2021)
	10. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Harmonisasi 4 (empat) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu: RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, dan RUU tentang Sulawesi Tenggara. (tgl 21 September 2021)
	11. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka 3 (tiga) RUU tentang Provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu: RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur. (tgl 21 September 2021)
	12. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Laporan Panja atas Hasil Harmonisasi 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. (tgl 23 September 2021)

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1	BKSAP - ABA	<p>3 September 2021 – BKSAP SDGs Day Bogor</p> <p>Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin ketuanya, Fadli Zon @fadlizon, melakukan dialog dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan sivitas akademika dari Universitas Djuanda dan Universitas Pakuan di Kantor Bupati Bogor, Jumat (3/9/2021), dalam kegiatan BKSAP SDGs Day.</p> <p>Kegiatan dengan tema “Urgensi Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor melalui Sinergi dan Kolaborasi serta Optimalisasi Potensinya” ini digelar sebagai forum publik untuk menyerap aspirasi pemangku kepentingan dalam mendukung upaya optimalisasi potensi daerah. Selain itu, untuk memperkenalkan peran BKSAP dalam melakukan diplomasi parlemen guna mencapai kepentingan nasional di kancah global.</p> <p>Ketua BKSAP Fadli Zon hadir didampingi Wakil Ketua Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Achmad Hafisz Tohir, anggota BKSAP Moh. Ichsan Firdaus, Fadhlullah, Ratih Megasari Singkaru, dan Muhammad Iqbal.</p> <p>Sementara dalam paparannya, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan Kabupaten Bogor selalu berinovasi secara kreatif untuk mencapai target pembangunan secara efektif sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, yang difokuskan pada upaya optimalisasi pembangunan daerah di seluruh bidang atau urusan pemerintahan.</p> <p>Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah mencanangkan program Rp 1 miliar satu desa (Samisade) untuk menopang pembangunan desa dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, BKSAP mengambil peran sebagai jembatan antara Pemkab Bogor</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>serta sivitas akademika dengan berbagai institusi di negara-negara dan grup kerjasama bilateral, maupun dalam berbagai konferensi dengan parlemen dari seluruh dunia. Hal itu untuk mempromosikan potensi Kabupaten Bogor sebagai upaya optimalisasi potensi daerah menuju pembangunan berkelanjutan di masa pandemi COVID-19.</p>
2.	BKSAP - KSI	<p>7 September 2021 – Sidang 5th World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria</p> <p>Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, menyampaikan butir-butir intervensinya dalam Sidang “5th World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP)” pada “motion 1: achieving sustainable development requires more attention on human well-being and environment preservation than on economic growth”, pada Selasa, 7 September 2021, di Wina, Austria.</p> <p>Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, aspek kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan hidup, maupun pembangunan ekonomi, ketiganya harus seimbang dan terintegrasi.</p> <p>Lebih lanjut Puan menambahkan bahwa bagi negara maju, karena telah mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi, tentu dapat mengalihkan perhatian kepada upaya perlindungan lingkungan hidup.</p> <p>Namun bagi negara berkembang, tetap diharapkan untuk melakukan pembangunan berimbang antara bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.</p> <p>Oleh karenanya, ekonomi hijau dan inklusif dapat menjadi alternatif solusi, sebab selain dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, pada saat bersamaan juga dapat melindungi lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim.</p> <p>“Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat melakukan ketiganya secara bersamaan,” ujar Puan optimis.</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
3.	BKSAP	<p>8 September 2021 – Pemaparan oleh Wakil Ketua BKSAP dan Anggota BKSAP dalam kegiatan Kampus Merdeka</p> <p>Wakil Ketua BKSAP Ir. H. Achmad Hafisz Tohir @hafisztohirachmad dan Anggota BKSAP Puteri Anetta Komarudin, B.Com. @puterikomarudin berbagi ilmu dan pengalaman dalam program Magang Bersertifikat – Kampus Merdeka yang diselenggarakan di DPR RI. Program ini merupakan program Kemendikbud Ristek di berbagai institusi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan hard skills dan soft skills agar mahasiswa siap untuk memasuki dunia kerja dan karirnya.</p> <p>Kegiatan di DPR RI ini yang bertajuk “Magang di Rumah Rakyat” diikuti oleh 200 mahasiswa terpilih dari seluruh Indonesia. BKSAP mengambil peran dalam kegiatan ini untuk memberikan mahasiswa pengalaman dan pengetahuan terkait “Diplomasi Parlemen”, yang merupakan tugas utama BKSAP.</p> <p>BKSAP menyambut hangat seluruh mahasiswa yang ikut serta dalam program ini, dan untuk minggu pertama dengan bangga akan menerima Kelompok "Akbar Tanjung" untuk merasakan pengalaman "seminggu di BKSAP"</p>
4.	BKSAP - KSB	<p>10 September 2021 – Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Argentina</p> <p>GKSB DPR RI - Parlemen Argentina mengadakan rapat internal secara virtual yang dipimpin oleh Ketuanya Martin Manurung, F-PNasdem dan dihadiri Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Argentina, Heri Gunawan (F-PGerindra), Supratman Andi Agtas (F-PGerindra), Willy Aditya (F-PNasdem), Siti Mukaromah (F-PKB), Ahmad Baidowi (F-PPP).</p> <p>Dalam rapat internal tersebut dibahas program kerja GKSB diantaranya pertemuan dengan Dubes/Wakil Dubes Argentina di Jakarta, dan rencana kunjungan untuk bertemu parlemen Argentina.</p> <p>Untuk pertemuan dengan Parlemen Argentina direncanakan pada masa persidangan kedua DPR RI (November). Selain pertemuan dengan parlemen, diharapkan dapat juga</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>diagendakan pertemuan dengan kementerian terkait untuk membahas beberapa isu yang menjadi kepentingan bersama, seperti kerjasama Selatan-Selatan maupun di bidang perdagangan, dengan Mercosur. Diharapkan kunjungan tersebut membawa manfaat nyata bagi Indonesia, terutama dalam peningkatan perdagangan kedua negara.</p>
5.	BKSAP - ABA	<p>10 September 2021 – BKSAP SDGs Day Palembang</p> <p>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Ir. Achmad Hafisz Tohir @hafisztohirachmad memimpin delegasi dalam kegiatan BKSAP SDGs Day yang bertajuk “Urgensi Diplomasi Parlemen dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Palembang melalui Sinergi dan Kolaborasi serta Optimalisasi Potensinya”, Jumat (10/9/2021), di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan.</p> <p>Turut hadir Ketua BKSAP Dr Fadli Zon, Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, anggota BKSAP Irine Yusiana Roba Putri, Puteri Anetta Komarudin, Hasbi Anshory, Didi Irawadi Syamsuddin, Jazuli Juwaini, Primus Yustisio, dan Ema Umiyattul Chusnah.</p> <p>Delegasi berdialog dengan Wali Kota Palembang Harnojoyo beserta jajaran, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Hari Widodo, pimpinan dan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah dan Universitas Muhammadiyah Palembang.</p> <p>Hafisz Tohir memaparkan peran strategis BKSAP dalam diplomasi parlemen dan area kerja sama DPR RI dengan pemerintah daerah demi terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam revitalisasi ekonomi dan pembangunan selama masa pandemi COVID-19. BKSAP memiliki peran penting dalam diplomasi dan menjembatani kerja sama agenda-agenda nasional dengan pemerintah dan stakeholder daerah, sehingga semakin sinergis dan saling melengkapi.</p> <p>Selama 2011–2019 laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera selatan, dan ini seiring dengan posisi Palembang sebagai tuan rumah dari berbagai kegiatan olahraga dan pertemuan internasional.</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Namun pada 2020, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota Palembang turut terdampak oleh pandemi COVID-19.</p> <p>Dalam diskusi ini peserta mendalami lebih jauh bagaimana area kerja sama DPR RI melalui BKSAP dengan pemerintah Kota Palembang, khususnya dalam menggali potensi UMKM serta membangun kekuatan pertanian di Palembang dan Sumatera Selatan, bisa ditingkatkan.</p>
6.	BKSAP	<p>13 September 2021 – Pemaparan oleh Wakil Ketua BKSAP dan Kepala Biro BKSAP dalam kegiatan Kampus Merdeka</p> <p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) @mardanialisera dan Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen Endah T.D Retnoastuti @endahretnoastuti melakukan sharing session dalam Magang Bersertifikat – Kampus Merdeka yang diselenggarakan di DPR RI. Program ini diusung oleh Kemendikbud Ristek di berbagai institusi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan mereka sehingga nantinya siap memasuki dunia kerja dan mengembangkan karir kedepannya.</p> <p>Memasuki minggu kedua, BKSAP memberikan mahasiswa pengalaman dan pengetahuan terkait “Diplomasi Parlemen”, yang menjadi tugas utama BKSAP. Dalam kesempatan ini narasumber BKSAP melakukan sesi tanya jawab dengan mahasiswa/i yang tergabung dalam kelompok “Zainul Arifin” terkait isu-isu yang sedang hangat di dunia internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, COVID-19, hingga konflik Myanmar.</p> <p>Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa/i bisa menimba ilmu dan mendapatkan sumber informasi sebanyak-banyaknya terkait peran dan kiprah Indonesia di dunia internasional.</p>
7.	BKSAP - KSB	<p>14 September 2021 – BKSAP Day Untirta</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>BKSAP Day bertajuk “Peran Parlemen dalam Mendukung Diplomasi Soft Power Melalui Dunia Pendidikan” sukses digelar pada hari Selasa, 14/9/2021. Selaku pimpinan delegasi, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (F-PKS) turut memberikan sosialisasi peran diplomasi parlemen dan memandu jalannya diskusi yang bertempat di Convention Hall Gedung Rektorat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Sindangsari, Banten.</p> <p>Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra) bersama dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), serta jajaran Anggota BKSAP Jazuli Juwaini (F-PKS), Asman Abnur (F-PAN), dan Gilang Dhielafararez (F-PDIP).</p> <p>Mengemban tugas sebagai Track 2 diplomacy, DPR RI menjalankan tugas parlemen sebagai bagian dari institusi resmi sebuah negara sekaligus mewakili aspirasi masyarakat (konstituen). Fadli Zon mengatakan, “BKSAP DPR RI sebagai focal point dalam menjalankan diplomasi parlemen harus bisa menjadi jembatan pihak civitas akademika untuk bekerja sama dengan pihak internasional”.</p> <p>Diplomasi DPR yang dimotori BKSAP dapat menjadi konektor dan fasilitator antara potensi pendidikan di Indonesia khususnya Untirta dengan mitra dialognya, baik multilateral maupun bilateral, di luar negeri. Mardani Ali Sera mengatakan, “It is not about the number, nor the size, but it is all about the quality of education”.</p>
8.	BKSAP - KSR	<p>14 September 2021 – BKSAP Day Bangli</p> <p>Putu Supadma Rudana (FPD) @putusupadmarudana , Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, memimpin Delegasi untuk kegiatan BKSAP Day bertemakan “Peran Strategis Diplomasi Parlemen dalam Percepatan Pembangunan SDGs dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi” di Bangli pada Selasa (14/9/2021).</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Anggota delegasi yaitu Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos MCOMN&MEDIAS (FPDIP) @irine.yusiana.roba ; Dyah Roro Esti, WP., BA., M.Sc. (FPG) @dyahroroestiwp; Katherina A. Oendoen (FP-Gerindra) @katherineoendoen; Linda Megawati, SE., M.Si. (FPD) @lindamegawati_official ; Didi Irawadi Syamsuddin, SH., L.LM. (FPD) @didi_irawadi dan Primus Yustisio, SE (F-PAN).</p> <p>Diskusi interaktif melibatkan Bupati Bangli dan Wakil Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Bangli, juga Ketua DPRD, Dekan Universitas I Gusti Bagus Sugriwa, berbagai sanggar Seni Budaya, Majelis Desa Adat dan Pengelola Desa Wisata Penglipuran.</p> <p>Ketangguhan Kabupaten Bangli bertahan di tengah pandemi dengan mengandalkan pengembangan kekuatan industri dan pertanian dapat menjadi teladan (best practices) bagi wilayah lainnya agar tidak bergantung semata pada sektor pariwisata.</p> <p>Kearifan lokal masyarakat adat Bangli dalam kehidupan sehari-hari mendukung konservasi alam berupa hutan kayu dan hutan bambu, energy saving melalui Hari Raya Nyepi dan pemeliharaan Danau Batur sebagai sumber kehidupan masyarakat Bangli telah sejalan dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bangli memiliki potensi yang dapat dioptimalkan sebagai national branding Indonesia untuk akselerasi diplomasi parlemen.</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
9.	BKSAP - KSB	<p>15 September 2021 – Courtesy Call GKSB DPR RI – Parlemen Argentina dengan Dubes Argentina</p> <p>Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR RI - Parlemen Argentina, Martin Manurung (F.P. Nasdem) melakukan Courtesy Call dgn Dubes Argentina H.E. Mr. Gustavo Arturo Torres pada 15 September 2021. Hadir dlm pertemuan tsb Anggota GKSB, Supratman Andi Agtas (F.P. Gerindra), Heri Hunawan (F.P.Gerindra) dan Siti Mukaromah (F.PKB)</p> <p>Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai upaya untuk peningkatan kerjasama antara kedua negara, termasuk dalam hubungan antar parlemen. Kerjasama yg terjalin antara kedua negara selama ini telah berlangsung dengan baik, termasuk dalam hal perdagangan, walaupun tentu saja masih banyak peluang kerjasama yg bisa ditingkatkan.</p> <p>Dubes menyampaikan harapannya agar MoU kerjasama terkait produk halal dapat ditandatangani pada pertemuan INALAC Oktober mendatang. Diinformasikan pula bahwa Dubes menyambut baik usulan peningkatan kerjasama antar parlemen kedua negara termasuk saling kunjung pada saat yg tepat. Argentina akan menyelenggarakan Pemilu legislatif pada 14 November 2021 dan akan dilantik pada 1 Maret 2022.</p> <p>Terkait penanganan Covid, Argentina memberlakukan penutupan perbatasan dan karantina bagi warga asing yang masuk Argentina. Namun demikian pengaturan ini akan menyesuaikan dengan kondisi yg ada di Argentina.</p> <p>Ketua GKSB menyampaikan apresiasinya atas informasi yg diberikan Dubes dan akan terus berkoordinasi untuk nantinya akan melakukan kunjungan pada waktu yg tepat.</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
10.	BKSAP - KSB	<p>15 September 2021 – Rapim BKSAP</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-PGerindra) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP yang berlangsung secara virtual, pada Rabu, 15 September 2021.</p> <p>Rapat dihadiri oleh jajaran Pimpinan BKSAP diantaranya Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-PD), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr. Sihar Sitorus (F-PDIP).</p> <p>Rapim membahas berbagai rencana program BKSAP di Masa Persidangan I dan setelahnya, antara lain undangan WTO Public Forum (29 September 2021), P20 Speaker's Summit (7-8 Oktober), Pre-COP26 Parliamentary Meeting (8-9 Oktober 2021), Asia-Europe Parliamentary Partnership (16 November 2021), Working Meeting Asia-Pacific Parliamentary Forum (awal November 2021), The 29th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (13-15 Desember 2021), dan Undangan dari Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan.</p> <p>Rapat juga membahas persiapan Webinar SEAPAC, persiapan penyelenggaraan sidang the 1st Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs, perkembangan aktifitas Grup Kerja Sama Bilateral dengan negara-negara sahabat, penajakan negara tujuan kunjungan diplomasi BKSAP dan perkembangan kunjungan diplomasi perorangan.</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
11.	BKSAP - KSB	<p>17 September 2021 – BKSAP SDGs Day Subang</p> <p>BKSAP SDGs Day bertajuk “Peran Strategis Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI Dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)” sukses digelar pada hari Jum'at, 17/9/2021. Selaku pimpinan delegasi, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) turut memberikan sosialisasi peran diplomasi parlemen dan memandu jalannya diskusi yang bertempat di Universitas Subang.</p> <p>Turut hadir dalam kesempatan tersebut, jajaran Anggota BKSAP DPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LLM (F-PD), Dr. Jazuli Juwaini (F-PKS), dan H. Nazaruddin Dek Gam, SH (F-PAN).</p> <p>Mengemban tugas sebagai second track diplomacy, DPR RI menjalankan tugas parlemen sebagai bagian dari institusi resmi sebuah negara sekaligus mewakili aspirasi masyarakat (konstituen). Diharapkan dalam menjalani tugas tersebut, DPR RI dapat membantu pemulihan dan pengembangan potensi ekonomi daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada seluruh daerah di Indonesia.</p> <p>Dalam pemaparan tersebut, Wakil Ketua BKSAP menyampaikan pentingnya pendidikan bagi pengembangan potensi daerah dan Human Development Index (HDI). Anggota BKSAP, Dr. Jazuli Juwaini menambahkan diharapkan lulusan dari Universitas Subang dapat membantu pemulihan ekonomi daerah. Beliau juga siap mendukung lulusan terbaik Universitas Subang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, Anggota BKSAP dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menekankan peran penting Subang sebagai lumbung pangan nasional, diharapkan BKSAP dapat memfasilitasi peningkatan potensi ekonomi Subang.</p> <p>Diplomasi DPR yang dimotori BKSAP dapat menjadi konektor dan fasilitator antara potensi pendidikan di Indonesia khususnya Universitas Subang dengan mitra dialognya, baik multilateral maupun bilateral, di luar negeri.</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
12.	BKSAP	<p>20 September 2021 – Pemaparan oleh Anggota BKSAP dan Kepala Biro BKSAP dalam kegiatan Kampus Merdeka</p> <p>Sharing session dalam Magang Bersertifikat – Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh BKSAP DPR RI kali ini melibatkan Anggota BKSAP Dyah Roro Esti, B.A., M.Sc. @dyahroestiwp dan Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen Endah T.D Retnoastuti @endahretnoastuti. Program ini diusung oleh Kemendikbud Ristek di berbagai institusi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan mereka sehingga nantinya siap memasuki dunia kerja dan mengembangkan karir ke depannya.</p> <p>Pada minggu ketiga ini, para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok “Puan Maharani” ini belajar tentang tugas dan fungsi utama BKSAP DPR RI dalam menjalankan diplomasi parlemen. Dalam kesempatan ini, narasumber @dyahroestiwp juga berbagi cerita tentang pengalamannya sebagai Anggota DPR RI muda yang, selain duduk di BKSAP, juga menjabat sebagai anggota Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup.</p> <p>Dalam paparannya, ia menjelaskan pengalamannya menjalankan soft diplomacy ketika menempuh pendidikan di luar negeri lalu diplomasi secara langsung ketika menjadi Anggota DPR RI. Berbagai informasi lainnya, mulai dari upaya elektrifikasi yang merata di Indonesia hingga langkah diplomatis DPR RI dalam menyikapi berbagai isu internasional yang tengah berkembang, seperti akses yang merata terhadap vaksin COVID-19, juga turut dipaparkan dalam sharing session kali ini.</p> <p>Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa/i bisa menimba ilmu dan mendapatkan sumber informasi sebanyak-banyaknya terkait peran dan kiprah Indonesia di dunia internasional.</p>
13.	BKSAP - ABA	<p>21 September 2021 – BKSAP SDGs Day Banyumas</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon, M.Sc (F-Gerindra) melakukan pertemuan dengan Bupati Banyumas Ir. Achmad Husein pada 21 September 2021 di Kantor Bupati Banyumas, membahas berbagai potensi kerja sama yang dapat dioptimalkan antara BKSAP DPR RI dan Kabupaten Banyumas.</p> <p>Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua BKSAP yaitu Putu Supadma Rudana (F. PD), Mardani Ali Sera (F. PKS), dan Achmad Hafisz Tohir (F. PAN), beserta anggota BKSAP lainnya yaitu Yohanis Fransiskus Lema (F. PDI-P), Fadhlullah (F. Partai Gerindra), Syahrul Aidi Ma'azat (F. PKS), dan Nazaruddin Dek Gam (F. PAN).</p> <p>Sebagai perwakilan akademisi antara lain hadir Wakil Rektor I Universitas Jenderal Soedirman Dr. Kuat Puji Prayitno, M. Hum, Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Purwokerto Ir. Aman Suyadi, M.P, serta beberapa mahasiswa dari kedua universitas tersebut.</p> <p>Melalui BKSAP Day, diharapkan terwujud sinergi antara parlemen, pemerintah daerah, dan akademisi dalam mendorong terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) baik di tingkat nasional maupun daerah, khususnya melalui fungsi diplomasi parlemen yang dimiliki DPR RI melalui BKSAP.</p> <p>Dalam pertemuan ini, Bupati Banyumas Ir. Ahmad Hussein menyampaikan berbagai hal terkait pembangunan daerah yang tengah dilakukan di wilayah Banyumas, antara lain yaitu upaya pemekaran wilayah Banyumas menjadi tiga wilayah yaitu Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Banyumas Barat.</p> <p>Salah satu tujuan dilakukannya pemekaran adalah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati akses pembangunan secara menyeluruh. Di samping itu, saat ini Banyumas juga tengah membangun berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan daerah.</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon mengapresiasi Banyumas yang secara aktif telah berupaya mencapai TPB melalui berbagai upaya dengan melibatkan masyarakat lokal. Selain itu, dalam kesempatan ini ia juga memaparkan berbagai upaya diplomasi parlemen yang dilakukan BKSAP dalam menyuarakan kepentingan nasional Indonesia di berbagai forum parlemen internasional maupun regional.</p>

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1	Badan Anggaran DPR RI	<p>A. Raker Banggar DPR-RI dengan Pemerintah dan BI dalam Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022</p> <p>Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah menyepakati hasil pembahasan empat panja. (A) Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan. (B) Panja Belanja Pusat dan (C) Panja Belanja Daerah serta (D) Panja RUU APBN 2022.</p> <p>1. Panja A (Asumsi Ekonomi Makro, Pendapatan dan Defisit dan Pembiayaan)</p> <p>A. Indikator asumsi ekonomi makro APBN 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. b) Inflasi 3 persen. c) Nilai Tukar Rupiah Rp 14.350 per 1 USD. d) Suku Bunga SUN 10 Tahun 6,8 persen. e) Harga minyak mentah Indonesia 63 USD/barel. f) Lifting minyak bumi 703 ribu barel/hari g) Lifting gas 1.036 ribu barel setara minyak/hari. <p>B. Sasaran dan Indikator Pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tingkat kemiskinan 8,5-9,0 persen. b) Tingkat pengangguran 5,5-6,3 persen. c) Ketimpangan (rasio gini) 0.376-0,378. d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,41-73,46. e) Nilai Tukar Petani (NTP) 103-106 dan f) Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104-106.

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>C. Pendapatan Negara sebesar Rp1.846,13 triliun yang terdiri dari:</p> <p>a) Pendapatan Dalam Negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan perpajakan Rp1.510 triliun yang bersumber dari PPh sebesar Rp680,88 triliun, PPn sebesar Rp554,38 triliun, PBB sebesar Rp18,36 triliun, Cukai sebesar Rp203,92 triliun, Pajak Lainnya sebesar Rp11,38 triliun; 2) Pendapatan Perpajakan Perdagangan Internasional Rp41,08 triliun; 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp335,55 triliun, yang bersumber dari Penerimaan SDA Migas sebesar Rp85,9 triliun, dan Penerimaan SDA Non Migas sebesar Rp36,05 triliun, Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebesar Rp37 triliun, PNBP Lainnya sebesar 97, 81 triliun, dan Pendapatan BLU sebesar 78,80 triliun <p>b) Penerimaan hibah Rp579,9 miliar.</p> <p>D. Defisit dan Pembiayaan mencapai Rp, 868,02 triliun (4,85% PDB).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan utang sebesar Rp 973,58 triliun, yang terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> 1) SBN netto sebesar Rp991,28 triliun. 2) Pinjaman Netto sebesar negatif Rp17,70 triliun; 2. Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp182,31 triliun; 3. Pemberian Pinjaman sebesar Rp585,5 miliar; 4. Kewajiban Penjaminan sebesar negatif Rp1,13 triliun; 5. Pembiayaan Lainnya (SAL) sebesar Rp77,30 triliun. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan mencapai 5,2 persen, cukup realistis jika melihat perkembangan ekonomi saat ini. Kita sudah memiliki modal yang baik pada Triwulan II-2021, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7,2 persen (yoy). Walaupun akan kembali tersendat pada Triwulan III-2021, kita optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan mencapai kisaran 3,7- 4,5 persen (yoy).

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Begitupula dengan inflasi, dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, diharapkan akan memberikan dampak terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat kembali normal, sehingga akan mendorong tingkat inflasi lebih tinggi. Kami memperkirakan tingkat inflasi pada tahun 2022, berkisar pada angka 3 persen (yoy). Komposisi ini menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ideal sesuai dengan situasi pada masa normal, sebelum terjadinya pandemi Covid-19. ▪ Adapun perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD berjalan relatif stabil sepanjang tahun 2021. Kita mengusulkan nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar Rp14.350. Besaran nilai tukar tersebut sudah memasukkan faktor kebijakan <i>Tapering off The Fed</i> pada tahun 2021. Kita yakin dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang terpadu antara Bank Indonesia dan Pemerintah, akan mampu memitigasi dampak guncangan akibat kebijakan The Fed, sejak awal. Sehingga tekanan terhadap rupiah tidak akan berdampak signifikan. ▪ Sedangkan pengelolaan suku bunga SUN 10 tahun juga menunjukkan tren positif seiring dengan menguatnya permintaan domestik khususnya dari perbankan, sehingga menyebabkan turunnya kepemilikan asing. Kita yakin, melihat tingginya permintaan domestik, maka suku bunga SUN 10 tahun realistis berada pada angka 6,8 persen dan Kepemilikan domestik bisa tetap dipertahakan. ▪ Membaiknya permintaan terhadap minyak mentah dunia, ikut memberikan dampak terhadap harga minyak mentah Indonesia (ICP). Melihat perkembangan ICP pada bulan Agustus 2021 mencapai 67,80 USD/barel. Diperkirakan hingga akhir tahun 2021 ICP berada pada kisaran 55-65 USD/barel. Sehingga cukup realistis, jika ICP pada tahun 2022 berada di level 63 USD/barel. ▪ Membaiknya harga minyak mentah di pasar Internasional, menjadi momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas bumi. Oleh sebab itu, kita mengusulkan pada tahun 2022, lifting minyak bumi sebesar 703 ribu barel/ hari dan lifting gas 1.036 ribu barel setara minyak/hari. <p>2. Panja B (Belanja Pusat)</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>A. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.944,54 triliun, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja K/L sebesar Rp945,75 triliun 2. Belanja non-K/L sebesar Rp998,79 triliun 3. Belanja non-K/L terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Utang Negara sebesar Rp405,87 triliun; b. Program Pengelolaan Subsidi sebesar Rp206,96 triliun; c. Program Pengelolaan Hibah sebesar Rp4.82 triliun; d. Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp231,13 triliun; e. Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp150,00 triliun. 4. Anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp542,83 triliun, atau 20,0 persen dari total belanja negara sebesar Rp2.714,15 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp182,81 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp290,54 triliun. 5. Anggaran kesehatan dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp256,01 triliun, atau 9,4 persen dari total belanja negara sebesar Rp2.714,15 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp189,08 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp66,93 triliun. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disiplin menjalankan arah kebijakan belanja negara tahun 2022, dengan melakukan penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Agenda ini diarahkan terbentuknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk menopang target pemulihan kesehatan rakyat, ketepatan dan kecermatan dalam melaksanakan program perlindungan sosial, pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, serta mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. ▪ Penguatan spending better melalui fokus belanja prioritas dan berorientasi hasil (result base), efisiensi belanja non prioritas baik dipusat maupun daerah, dan antisipatif terhadap berbagai faktor yang menjadi sumber ketidakpastian seperti potensi naiknya pandemi Covid-19, bencana

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>alam karena efek la nina yang panjang, geo politik dan keamanan global, serta melakukan reformasi subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, dan tepat waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyepakati formulasi subsidi listrik dan LPG yang lebih tepat sasaran. Subsidi listrik akan terintegrasi datanya di DTKS, menerapkan kebijakan automatic tariff adjustment untuk pelanggan non-subsidi serta menentukan besaran subsidi untuk setiap rumah tangga penerima subsidi listrik. Terkait subsidi LPG, kita harapkan pemerintah secepatnya mengalihkan mekanisme distribusi LPG subsidi dari penjualan terbuka menjadi semi tertutup. <p>3. Panja C (Belanja Daerah)</p> <p>A. Anggaran TKDD sebesar Rp769,61 triliun yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transfer ke Daerah sebesar Rp701,61 triliun <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Perimbangan sebesar Rp672,86 triliun <ol style="list-style-type: none"> 1) Dana Transfer Umum sebesar Rp483,26 triliun <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana Bagi Hasil sebesar Rp 105,26 triliun, dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp378 triliun; 2) Dana Transfer Khusus sebesar Rp 189,59 triliun <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp60,87 triliun ▪ Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp128,71 triliun. b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp7 triliun c. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp21,76 triliun. 2. Dana Desa sebesar Rp68 triliun. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran TKDD diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Kita mendorong agar TKDD lebih efektif dengan mengedepankan transfer berbasis kontrak, langkah bisa meminimalisir dampak <i>idle cash</i> di daerah yang jumlahnya cukup besar. Jika kinerja belanja daerah tidak ada perbaikan yang signifikan, maka harapan dampak pembangunan di daerah yang bisa dirasakan oleh rakyat masih jauh dari harapan. Momentum reformasi fiskal daerah dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, terlebih saat ini sedang pembahasan Rancangan Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) antara Komisi XI DPR dengan pemerintah. Kita

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>harapkan undang undang ini cepat selesai dan menjadi bekal pemerintah daerah memperbaiki fiskalnya, sehingga bisa menjadi instrument pembangunan didaerah yang optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong perubahan komposisi belanja untuk pembangunan proporsinya jauh lebih besar daripada anggaran rutin yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Pemerintah sudah harus mulai melakukan langkah afirmatif agar setidaknya 40 persen dari DAK dan DD dipersiapkan minimal 3 tahun kedepan untuk program ketahanan pangan, khususnya infrastruktur pertanian. Langkah ini untuk menopang swasembada pangan dan ketahanan kebutuhan pangan hewani. Pemerintah daerah bersedia mengalokasikan minimal Rp 1 miliar dari APBD nya khusus untuk program penghijauan didaerahnya masing masing. ▪ Kebijakan perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum Nasional, harus disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan, baik yang terkait dengan skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola Dana Otsus dalam bentuk <i>block grant dan specific grant</i> berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya kita berharap kebijakan ini akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh dan Papua secara keseluruhan. <p>4. Panja RUU APBN 2022. RUU APBN 2022 terdiri dari 49 pasal, penjelasan dan 2 lampiran.</p>

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Rapat Intern, 28 Agustus 2021 Agenda: Penetapan Jadwal Kegiatan BURT MS 1 TS 2021-2022	---	
2.	Rapat BURT, 26 Agustus 2021 Agenda: Nota Penjelasan Sekjen tentang Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan 2 Tahun 2021	Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp2.523.720.103.631,00,- atau 42,27% dari pagu sebesar Rp5.971.101.736.000,00,- (Realisasi Satker Dewan 44,59% dan Realisasi Satker Setjen 35,73%).	Pembahasan dan pendalaman dilanjutkan melalui mekanisme panja (Rapat Panja dilaksanakan tgl 30 Agustus 2021)
3.	Rapat BURT, 31 Agustus 2021 Agenda: Nota Penjelasan Sekjen tentang RKA DPR RI Tahun 2022 Berdasarkan Pagu Anggaran	Pagu Anggaran RKA DPR RI Tahun 2022 sebesar Rp5.564.598.686.000,-	Pembahasan dan pendalaman dilanjutkan melalui mekanisme panja (Rapat Panja dilaksanakan tgl 1 September 2021)
4.	Rapat BURT, 21 September 2021 Agenda:	Alokasi Anggaran RKA DPR RI Tahun 2022 sebesar Rp5.714.471.327.000,-	

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
	Nota Penjelasan Sekjen tentang RKA DPR RI Tahun 2022 Berdasarkan Alokasi Anggaran		
5.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka: 1. Pengawasan pelayanan keprotokolan di Bandara. 2. Pengawasan pelayanan program Jamkestama yang dilaksanakan rumah sakit provider Asuransi Jasindo	---	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1.	Rapat Dengar Pendapat Umum tgl 25 Agustus 2021 Pkl 13.00 Wib dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) untuk memperoleh masukan dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional.	Rapat Dengar Pendapat Umum
2.	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2021.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam rangka memperoleh masukan dari civitas akademisi IPDN atas penelaahan BAKN DPR RI dengan tema pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus.	Kunjungan Kerja
3.	Institut Pertanian Bogor (IPB) tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2021.	Akuntabilitas Keuangan Negara;	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka memperoleh masukan dari civitas	Kunjungan Kerja

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
			akademisi IPB atas penelaahan BAKN DPR RI dengan tema Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional.	
4.	Rapat Kerja tgl. 1 September 2021, Pukul 13.00 Wib dengan Mendagri RI, Kemenkeu RI dan Bappenas RI.	Akuntabilitas Keuangan Negara;	BAKN DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Mendagri RI, Kemenkeu RI dan Bappenas RI. dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Dana Alokasi Khusus	Rapat Kerja
5.	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, tgl. 3 s.d. 3 September 2021.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung dalam rangka memperoleh masukan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas penelaahan yang dilakukan oleh BAKN DPR RI dengan tema pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus.	Kunjungan Kerja
6.	Universitas Airlangga, tgl 6 s.d. 8 September 2021.	Akuntabilitas Keuangan Negara;	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas Airlangga dalam rangka memperoleh masukan dari civitas akademisi Universitas Airlangga atas penelaahan BAKN DPR RI dengan tema Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional.	Kunjungan Kerja

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
7.	Universitas Padjadjaran, tgl 23 s.d. 25 September 2021.	Akuntabilitas Keuangan Negara;	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas Padjadjaran dalam rangka memperoleh masukan dari civitas akademisi Universitas Padjadjaran atas penelaahan BAKN DPR RI dengan tema Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional.	Kunjungan Kerja
8.	Rapat Dengar Pendapat tgl. 4 Oktober 2021, Pukul 13.00 dengan BPKP RI.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan BPKP RI untuk memperoleh masukan dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional.	Rapat Dengar Pendapat